

PENYULUHAN PARTISIPATIF

bagi
KELOMPOK WANITA TANI
(Mendukung Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari)

Buku ini membahas tentang konsep kelompok wanita tani yang digerakkan di desa maupun di kota dengan mendukung program-program PKK serta kebijakan pemerintah. Peranan kelompok wanita tani dalam mendukung pembangunan terutama membantu ketahanan pangan rumah tangganya sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera.

Metode dan teknik penyuluhan partisipatif yang digunakan untuk membina kelompok wanita tani dibahas lebih rinci sehingga mudah diimplementasikan oleh penyuluh pertanian maupun widyaiswara dalam membina kelompok wanita tani tersebut. Penyuluhan partisipatif dikupas beserta contohnya untuk memudahkan dalam memahami implementasinya, sehingga suatu kegiatan penyuluhan masyarakat maupun penyuluhan pertanian dapat berhasil dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Penyuluhan partisipatif yang merupakan bagian dari konsep belajar sepanjang hayat, akan mendorong warga belajar untuk berani mengemukakan pendapat serta terlibat aktif di setiap kegiatan. Sehingga akan mampu merubah pandangan seseorang untuk terus belajar dan dapat mendukung kemajuan masyarakat.

ISBN 978-602-289-368-4



9 786022 893684

Penerbit **ALFABETA**

Jl. Gegerkalong Hilir Bandung
Telp. 022-2008822 Fax. 022-2020373
e-mail: alfabetabd@yahoo.co.id
website: www.cvalfabeta.com

ISBN: 978-602-289-368-4

Tan04-112

Dr. Ir. Hj. Nataliningsih, M.Pd.

PENYULUHAN PARTISIPATIF BAGI KELOMPOK WANITA TANI



Dr. Ir. Hj. Nataliningsih, M.Pd.

PENYULUHAN PARTISIPATIF

bagi
KELOMPOK WANITA TANI
(Mendukung Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari)



Dr. Ir. Hj. Nataliningsih, M.Pd.

**PENYULUHAN
PARTISIPATIF
BAGI
KELOMPOK WANITA TANI**

(Mendukung Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari)



PENERBIT ALFABETA BANDUNG

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

© 2017, Penerbit Alfabeta, Bandung

Tan04 (viii + 104) 16 x 24 cm

Judul Buku : Penyuluhan Partisipatif
bagi Kelompok Wanita Tani

Penulis : Dr. Ir. Hj. Nataliningsih, M.Pd.

Seting : Sandi F.

Penerbit : **ALFABETA** cv

Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung

Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373

Website: www.cvalfabeta.com

Email: alfabetabdg@yahoo.co.id

Cetakan Kesatu : Januari 2018

ISBN : 978-602-289-368-4

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

KATA SAMBUTAN

EDISI PERTAMA

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut dengan gembira penerbitan buku ajar (text book) dengan judul *Penyuluhan Partisipatif Bagi Kelompok Wanita Tani* oleh Dr. Ir. Hj. Nataliningsih M.Pd, selaku dosen tetap di Universitas Winaya Mukti.

Buku ini membahas tentang konsep kelompok wanita tani yang digerakkan di desa maupun di kota dengan mendukung program-program PKK serta kebijakan pemerintah. Peranan kelompok wanita tani dalam mendukung pembangunan terutama membantu ketahanan pangan rumah tangganya sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera.

Metode dan teknik penyuluhan partisipatif yang digunakan untuk membina kelompok wanita tani dibahas lebih rinci sehingga mudah diimplementasikan oleh penyuluh pertanian maupun widyaiswara dalam membina kelompok wanita tani tersebut. Penyuluhan partisipatif dikupas beserta contohnya untuk memudahkan dalam memahami implementasinya, sehingga suatu kegiatan penyuluhan masyarakat maupun penyuluhan pertanian dapat berhasil dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Penyuluhan partisipatif yang merupakan bagian dari konsep belajar sepanjang hayat, akan mendorong warga belajar untuk berani mengemukakan pendapat serta terlibat aktif di setiap kegiatan. Sehingga akan mampu merubah pandangan seseorang untuk terus belajar dan dapat mendukung kemajuan masyarakat.

Kami berkeyakinan, buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, penyuluh, widyaiswara maupun masyarakat umum yang membutuhkan wawasan dalam bidang pendidikan masyarakat pada umumnya dan penyuluhan masyarakat khususnya.

Bandung, Desember 2017

Dr. H. Gijanto Purbo Suseno, S.E. M.Sc.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Ridho Allah SWT, buku dengan judul “Penyuluhan Partisipatif bagi Kelompok Wanita Tani” dapat penulis selesaikan, semoga dapat menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi semua pihak. Buku ini dapat dijadikan pegangan para dosen, mahasiswa, penyuluh pertanian, widyaiswara, serta semua orang atau lembaga yang bergerak dalam pembinaan Kelompok Wanita Tani.

Buku edisi pertama ini membahas tentang pentingnya membina kelompok wanita tani dalam rangka memberdayakan lahan pekarangan rumahnya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari, dilakukan agar para wanita memanfaatkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bahkan untuk dikelola sebagai usaha rumah tangga yang dapat meningkatkan pendapatnya.

Kerja sama dengan Penyuluh Pertanian serta menggandeng kelompok kerja PKK, diharapkan buku ini dapat dijadikan acuan dalam membina ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani untuk membangun Kawasan Rumah Pangan Lestari. Sehingga kebijakan pemerintah dengan slogan “Desa Mandiri Pangan Menuju Desa Sehat” dapat segera terwujud.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Allah SWT, suami serta anak-anak ku yang telah mendukung penulisan buku ini, serta penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Bandung, Desember 2017
Dr. Ir. Hj. Nataliningsih, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN EDISI PERTAMA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I

KARAKTERISTIK KELOMPOK WANITA TANI	1
A. Karakteristik Wanita	1
B. Karakteristik Kelompok Tani	6
C. Karakteristik Kelompok Wanita Tani di Kota	9

BAB II

PEMBANGUNAN MASYARAKAT	17
A. Konsep Pembangunan Masyarakat	17
B. Konsep Pembangunan Masyarakat Pertanian	23
C. Konsep Pembangunan Masyarakat Pertanian Kota	33

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN	37
A. Konsep Penyuluhan Pertanian	37
B. Metode Penyuluhan	53
C. Teknik Penyuluhan	67
D. Materi Penyuluhan	70
E. Proses Penyuluhan	78
F. Evaluasi Hasil Penyuluhan	79

BAB IV

IMPLEMENTASI PENYULUHAN PARTISIPATIF

PADA KELOMPOK WANITA TANI	84
A. Konsep Penyuluhan Partisipatif	84
B. Analisis Kebutuhan Penyuluhan	86
C. Penentuan Tujuan Penyuluhan	92
D. Penentuan Materi Penyuluhan	93
E. Pembagian Tugas dalam Kegiatan Penyuluhan	94
F. Persiapan Jadwal Penyuluhan.....	95
G. Pelaksanaan Penyuluhan	96
H. Evaluasi Hasil Penyuluhan	97
I. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kurva Produksi Padi (Juta Ton) dari Tahun 2011-2014	20
Tabel 2.2. Kurva Produksi Jagung (Juta Ton) dari Tahun 2011-2014	20
Tabel 2.3. Kurva Produksi Kedele (Juta Ton) dari Tahun 2011-2014	21
Tabel 3.1. Isu-isu Aktual Permasalahan Pertanian di Jawa Barat.....	38
Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan PENYULUHAN.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.4. Peranan TNI dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat (Sumber Seminar lemhanas 2015)	29
Gambar	2.5. Tahapan Pembangunan Pertanian	32
Gambar	3.1 Transformasi Paradigma Pembangunan Jawa Barat 2015	46

BAB I

KARAKTERISTIK KELOMPOK WANITA TANI

A. Karakteristik Wanita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menggariskan sasaran yang ingin dicapai terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, antara lain ialah: 1) Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik, 2) Membaiknya angka GDI (*Gender Related Development Index*) dan angka GEM (*Gender Empowerment Measure*), 3) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan (Bappenas 2004). Sedangkan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, 2) meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (KPP-PA 2010). Dengan demikian perlu ditingkatkan peran perempuan dalam bidang pembangunan khususnya bidang pertanian. Oleh karena itu pembangunan bidang pertanian masih terus dilakukan. Secara keseluruhan pembangunan pertanian adalah pembangunan yang memihak pada bidang pertanian, hal ini dilakukan karena melalui pembangunan pertanian diharapkan mampu; 1) meningkatkan

pertumbuhan perekonomian nasional (*pro growth*), 2) mampu menciptakan lapangan pekerjaan (*pro job*), 3) mengurangi kemiskinan (*pro poor*) dan 4) mampu mendukung pelestarian lingkungan hidup (*pro environmental*). Untuk mendukung suksesnya pembangunan pertanian maka DPR RI melalui komisi IV (2014-2019) akan selalu mendukung program pemerintah, apabila bertujuan pada kemajuan pertanian dan petani melalui:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, lumpung, jalan desa, dan jalan usaha tani.
2. Jaminan penguasaan lahan produktif.
3. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
4. Penguatan kelembagaan pembenihan dan pembibitan nasional.
5. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
6. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah.
7. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.

Sebagai langkah kongkrit dari DPR RI menurut Andi Akmal Pasluddin (2015) akan melakukan langkah revitalisasi dalam mencapai swasembada pangan yaitu revitalisasi lahan, revitalisasi pembenihan dan pembibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani dan revitalisasi teknologi dan industri hilir. Salah satu tindakan dalam revitalisasi sumber daya manusia adalah pemberdayaan kelompok wanita tani untuk turut mendukung menuju terciptanya ketahanan pangan keluarga sehingga kebijakan desa mandiri pangan menuju desa sehat dapat terwujud.

Secara sosiologis wanita adalah anggota dari suatu keluarga sehingga status ekonomi keluarga, miskin atau kaya, akan turut mempengaruhi posisi ekonomi wanita yang bersangkutan. Wanita dalam keluarga berperan penting dalam penerus keturunan, sehingga ekonomi keluarga berpengaruh pada kehidupan wanita yang dapat digambarkan melalui AKI (Angka Kematian Ibu) dan ABI (Angka

Kematian Bayi) yang masih relatif tinggi, kasus kurang gizi, pendidikan yang rendah, serta kekurangan lain yang mengakibatkan wanita tertinggal.

Secara kondisi, wanita diposisikan untuk melakukan peran tiga I yaitu sebagai Istri, Ibu Rumah Tangga, dan Ibu Keluarga. Selanjutnya ketiga peran tersebut diuraikan menurut Hubeis (2010):

1. Sebagai seorang istri, perempuan berfungsi melaksanakan peran reproduksi yaitu mengandung dan melahirkan anak. Bagi suami maupun negara, anak adalah penerus generasi keluarga maupun penerus generasi bangsa. Dalam GBHN dan Repelita, peran penerus generasi bangsa diletakkan pada pundak wanita karena memang wanitalah yang dapat mengandung dan melahirkan anak.
2. Sebagai seorang ibu rumah tangga, perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga. Tugas ini mencakup penyediaan makanan untuk anggota keluarga, mengurus dan menata rumah, dan sebagainya yang terkait dengan upaya menumbuhkan kenyamanan dan keasrian rumah tangga. Karena itu sampai saat ini, masih ada persepsi yang mengakar kuat di masyarakat bahwa tugas rumah tangga adalah tugas seorang perempuan dan bukan tugas bersama (Laki dan perempuan), apalagi dinyatakan sebagai tugas lelaki.
3. Sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan bertugas mengasuh dan mendidik anak, karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan urusan anak menjadi tanggung jawab perempuan (Ibu). Peran ini sangat berat karena anak terkait sebagai penerus generasi keluarga maupun bangsa yang harus diasuh dan dididik sebaik mungkin, oleh karena itu perlunya peningkatan pengetahuan, sikap maupun ketrampilan wanita dalam mengasuh dan mendidik anak.

Dari program di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, masih menganggap bahwa wanita mengurus rumah tangga, tetapi agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan maka wanita harus pula terlibat aktif dalam pembangunan sehingga muncullah persepsi baru bagi wanita yaitu mempertahankan kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga. Sebagai indikator kesuksesan tingkat mikro dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai indikator kesuksesan tingkat makro. Untuk menjembatani permasalahan tersebut dapatlah dilakukan pemberdayaan wanita dengan scope tingkat rumah

tangga. Akibat pencitraan tersebut, wanita cenderung memilih salah satu bentuk peran yang melekat pada wanita yaitu:

1. Perempuan sebagai manajer rumah tangga (RMT), yaitu menjalankan peran tradisional yaitu reproduksi dan pengasuhan secara 100 persen (istri, ibu keluarga dan ibu rumah tangga). Kerisauan timbul dengan adanya persepsi bahwa peran manajer RMT bukan wujud partisipasi konkret manusia pembangunan. Alasannya, karena tidak menghasilkan sesuatu yang dapat diukur, misalnya out put (luaran), ekonomi (rupiah, produk).
2. Perempuan sebagai pekerja dan manajer rumah tangga memiliki kecenderungan menjalankan peran tradisional dan ganda. Disini perempuan dituntut untuk mampu membagi diri dan mengalokasi waktu demi 4-K (Kemantapan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan) keluarga. Jika ini tidak dilakukan, akan timbul peluang konflik batin dan tekanan atau beban kerja yang lebih berat dibanding lelaki.
3. Perempuan sebagai pekerja profesional, umumnya berperan egalitarian dan kontemporer. Fenomena ini ekstrim, memerlukan kepedulian hakiki dari lelaki agar tidak terjadi benturan dan konflik kepentingan. Jika tidak, akan semakin memicu keekstreman opsi perempuan untuk bersoliter dan menghindari peran reproduksinya, dan ini tentu saja kontroversial dengan nilai agama dan budaya yang berlaku.

Untuk menjembatani nilai agama, budaya dan peran wanita penerus bangsa serta menjaga kelestarian, keharmonisan serta kesehatan keluarga maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan wanita yang masih tetap mengutamakan perannya sebagai wanita. Salah satu konsep pemberdayaan tersebut adalah membentuk kelompok wanita dan memberdayakan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam rangka mendukung ketahanan pangan rumah tangganya.

Penyuluhan pertanian kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar adalah penting untuk pengembangan sektor pertanian. Namun, perempuan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pertanian di tingkat rumah tangga, dan negara pada umumnya. Kebutuhan akan keterlibatan

perempuan dalam program pelatihan pertanian sangat penting untuk memastikan potensi penuh mereka dimanfaatkan dalam pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penyuluhan pertanian: petani perempuan memiliki akses dan kepemilikan lahan yang lebih sedikit, sangat sedikit yang memiliki keanggotaan pada petani. Selain itu, kebanyakan petani menggunakan cangkul tangan untuk bekerja di peternakan mereka, dan kebanyakan wanita menanam tanaman pangan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa petani perempuan menggunakan input agro seperti pupuk, pestisida. Sangat sedikit menggunakan bibit unggul karena mereka tidak memiliki cukup informasi.(Gwivaha, 2015)

Rekomendasi berikut dibuat sehubungan dengan temuan penelitian di atas: 1) Pemerintah harus mendorong dan membantu petani perempuan dengan memberi mereka perhatian khusus dalam hal akses terhadap input dan insentif pertanian yang dibutuhkan. Penerapan pertanian baru harus terjangkau dan tersedia bagi perempuan. 2) Program pendidikan keaksaraan perempuan dewasa diperlukan untuk membantu petani perempuan mendapatkan keterampilan dan kemampuan dasar untuk mencari dan menerima informasi pertanian melalui penyuluh. Hal ini akan membuat mereka lebih banyak berpartisipasi dalam membaca leaflet perpuluhan, buletin, newsletter dll. 3) Fasilitas kredit harus disediakan oleh pemerintah baik melalui berbagai kelompok perempuan dan koperasi sehingga memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam kegiatan pertanian. Akhirnya mempertimbangkan peran perempuan dalam usaha produksi pertanian, informasi pertanian kepada petani harus bersifat jender dan sensitif. (Chukwu & Miriam, 2014)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pedesaan dalam program penyuluhan pertanian adalah cukup. Perempuan pedesaan memiliki lebih banyak interaksi dengan penyuluh pertanian dan fasilitator perempuan. Selain itu, hubungan yang signifikan ditemukan antara beberapa karakteristik individu dan profesional perempuan pedesaan dan partisipasi mereka dalam program penyuluhan pertanian. Selain itu, hasil dari regresi berganda menunjukkan bahwa sekitar 32 persen perubahan partisipasi perempuan pedesaan dalam program penyuluhan diidentifikasi oleh pengalaman

mereka dalam padi. pertanian dan tingkat pendidikan mereka (Soltani, Ahmadpour, & Feali, 2011)

Konsep tanggung jawab bersama telah diterapkan oleh koperasi perempuan Setia Bhakti Wanita (SBW) Surabaya, dan menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga koperasi tersebut masuk dalam 100 koperasi besar di Indonesia. Tanggung jawab bersama mampu mengubah sikap dan perilaku anggota, perubahan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan rasa kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling percaya, disiplin dan tanggung jawab, yang kemudian disebut sebagai nilai tanggung renteng. Asas tanggung renteng dalam mengelola anggota koperasi perempuan tani yang berada di Sumedang, Jawa Barat, dengan budaya yang berbeda maka diharapkan konsep ini tetap bisa dilaksanakan sehingga bisa memperbaiki dan memajukan koperasi wanita. (Suseno & Nataliningsih, 2017)

B. Karakteristik Kelompok Tani

Petani selalu hidup berkelompok, tugas penyuluh membina kelompok tersebut. Faktor penyebab petani berkelompok antara lain:

1. Ke saling-tergantungan dalam pengelolaan usaha tani
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - b. Penggunaan tenaga kerja (manusia, alat, hewan)
 - c. Mendapatkan pelayanan (kredit, penyuluhan dll)
 - d. Perlindungan tanaman
 - e. Kegiatan sosial (kerja bhakti, gotong royong)
2. Petani merupakan suatu sistem sosial yang terjadi dari keluarga, orang yang mempunyai kesesuaian meliputi:
 - a. Minat, pandangan, kesenangan, kepentingan
 - b. Saling pengertian dalam kelompoknya
 - c. Hubungan yang wajar dalam suasana kekeluargaan
 - d. Komunikasi yang lancar dalam kelompoknya.

Satu kelompok tani terdiri dari 15-20 orang anggota dan setiap 16 kelompok tani dimasukkan dalam 1 *WILUD* (Wilayah Unit Desa) dengan area kelompok 40-60 Ha, kemudian setiap 10 *WILUD* dengan luas

daerah 600-1000 Ha akan dibina oleh 1 BPP (Balai Penyuluh Pertanian) yang berada di kecamatan. Sebagai tindak lanjut pemberdayaan kelompok tani di setiap desa akan disediakan 1-2 Penyuluh Pertanian, agar kebijakan-kebijakan pemerintah dapat segera disampaikan dan diimplementasikan. Dengan demikian pembagian kelompok tani di desa sangatlah jelas, bagaimana jika akan membentuk kelompok tani di wilayah kota, yang tidak mempunyai areal sawah seluas ketetapan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka pembagian kelompok dapat dilakukan berdasarkan jumlah anggota atau kedekatan wilayah akan memudahkan dalam pembinaan, beberapa konsep pembinaan dan pembagian wilayah unit desa adalah sebagai berikut:

1. *Local Verification Trial*

Dilakukan dengan mengidentifikasi kembali lokasi atau areal pertanian yang menjadi wilayah pembinaan, untuk mengatur pola pertanaman dan unggulan lokal yang dapat diberdayakan. Kecocokan antara data desa dengan fisik lapangan memudahkan pemetaan lahan pertanian. Sebagai contoh adalah pembinaan pertanian di kabupaten Brebes, dengan tanaman unggulan bawang merah, untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan maka tidak semua wilayah pertanian digunakan untuk bercocok tanam bawang merah, akan tetapi di petakan sehingga sebagian digunakan untuk tanaman pangan dan sebagian untuk tanaman unggulan bawang merah, yang penanamannya bergiliran untuk setiap kelompok tani.

2. *Input and Output Market*

Pembinaan ditekankan pada pertanian yang berafiliasi pada produk yang dibutuhkan pasar. Pengadaan benih dari benih yang bersertifikasi dan hasilnya dapat diterima pasar sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil. Sebagai contoh budidaya tanaman yang selalu dibutuhkan pasar yaitu sayuran, cabe, bawang merah, tomat dan lain sebagainya. Diharapkan petani menanam produk hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat sehingga pasar dapat menerima dan mudah dalam pemasaran.

3. Penyuluhan

Kelompok tani membutuhkan informasi yang paling baru dalam mendukung usaha taninya. Informasi-informasi tersebut dapat disampaikan melalui penyuluhan. Konsep penyuluhan adalah pendidikan non formal dengan proses pembelajaran andragogi, metode penyuluhan adalah partisipatif sehingga materi yang disuluhkan adalah yang sesuai kebutuhan kelompok tani. Penyuluhan pertanian partisipatif adalah kegiatan penyuluhan pertanian yang melibatkan petani dari analisis kebutuhan, menetapkan tujuan, persiapan penyuluhan, pelaksanaan dan evaluasi hasil penyuluhan, sehingga anggota petani yang terlibat akan terus mengikuti kegiatan penyuluhan ini karena bahan penyuluhan sesuai kebutuhan. Pada proses penyuluhan dapat diimplementasikan pembelajaran kooperatif tanpa disadari oleh anggota petani (Nataliningsih, 2016).

4. Kredit Pertanian

Untuk mendukung peningkatan cara budidaya agar hasil pertanian meningkat dibutuhkan dukungan modal usaha tani. Modal usaha dapat diperoleh melalui kredit usaha tani atau kredit pertanian yang sangat didukung oleh pemerintah, sehingga seorang penyuluh harus mampu membina kelompok tani dengan administrasi dan dinamika kelompoknya sehingga dapat layak diberi bantuan modal usaha, diharapkan dari keuntungan hasil usahanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembalikan pinjaman. Seorang penyuluh mampu melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, untuk dapat memenuhi kebutuhan modal bagi kelompok tani yang dibinanya.

5. Jaringan Jalan

Akses jalan sangat dipikirkan dalam rangka mempermudah pemasaran hasil pertanian, karena sifat hasil pertanian adalah perishable atau mudah rusak karena kandungan air yang tinggi, sehingga jika pemasaran tertunda karena faktor jalan maka akan meningkatkan *loss* (hilang), menurunkan kualitas sehingga harganya menjadi murah. Sebagai contoh cabe yang merupakan jenis hasil pertanian dengan kadar air tinggi setelah dipetik tetap mengalami respirasi dan transpirasi sehingga kerusakan yang paling cepat adalah kelayuan, cabe yang layu

kurang diminati konsumen. Oleh karena itu akses jalan harus diutamakan agar cabe dapat segera sampe ke konsumen.

Program-program penyuluhan yang ditujukan pada kelompok tani berdampak pada peningkatan kesejahteraan kelompok tani dan keluarganya yang ditunjukkan adanya peningkatan IPK menyangkut pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan kelompok tani, penyuluhan yang disampaikan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

C. Karakteristik Kelompok Wanita Tani di Kota

Kelompok tani wanita adalah kelompok tani yang dikelola oleh wanita, beranggotakan wanita atau laki-laki sebagai anggota kehormatan. Di pedesaan yang lebih berkembang adalah kelompok-kelompok tani yang pengelola maupun anggotanya adalah laki-laki, kelompok tani wanita tergabung dalam kelompok PKK di kelurahan atau di kantor desa yang ketuanya adalah ibu Kepala Desa atau ibu Lurah, sehingga kegiatannya tidak hanya terbatas pada pertanian tetapi menyeluruh terdiri dari 10 pokok program PKK.

Kebijakan pertanian salah satunya adalah ketahanan pangan yang diterjemahkan lebih lanjut yaitu “ Desa Mandiri Pangan”, yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan Menteri Kesehatan sehingga slogannya menjadi “ Desa Mandiri Pangan Menuju Desa Sehat “, dengan demikian masyarakat tidak kekurangan pangan dan meningkat kesehatannya. Bagaimana implementasi slogan tersebut di desa maupun di kota ?, pemanfaatan pembentukan kelompok tani wanita adalah langkah yang disarankan, karena wanita berperan mengatur rumah tangga, pangan maupun kesehatan keluarganya.

Kelompok tani wanita desa mempunyai sisa sawah atau pekarangan untuk kegiatan usaha taninya atau minimal tanah-tanah di sekitar rumahnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatannya. Berdasarkan luas lahan, kemampuan mengelola usaha tani, dinamika kelompok dan kerja sama dengan pihak lain, maka kelompok tani dapat dibagi menjadi 4 klas yaitu:

1. kelompok tani pemula
2. kelompok tani lanjut

3. kelompok tani madya
4. kelompok tani pembina

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Eksi, 2010) permasalahan-permasalahan Kelompok Wanita Tani (KWT) pengolah hasil pertanian antara lain: (1) di bidang pertanian belum termanfaatkannya lahan pekarangan secara optimal; (2) di bidang industri dimana perilaku UKM pengolah hasil pertanian lebih didominasi oleh wanita dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang cenderung belum optimal dan belum profesional dalam pengolahan makanan; (3) di bidang ketenagakerjaan atau pemberdayaan dimana kecenderungan rendahnya pola manajemen usaha tani; serta (4) permasalahan dalam proses pemasaran dimana masih adanya kekurangpahaman KWT tentang ijin usaha.

Berdasarkan penilaian yang mengacu pada keragaman penilaian kelompok tani, mereka dapat naik ke jenjang kelompok tani berikutnya, oleh karena itu pembinaan terhadap kelompok tani sangat diharapkan agar menaikkan jenjang kelompoknya yang dapat meningkatkan pula fasilitas-fasilitas yang diperolehnya. Di Jawa Barat jumlah kelompok tani pemula mencapai 54,5%, mereka membutuhkan pembinaan terus menerus, sedangkan untuk kelompok tani wanita desa belum banyak diidentifikasi karena keberadaannya bersamaan dengan kelompok PKK.

Istilah ketahanan pangan diberlakukan bagi semua masyarakat Indonesia baik di desa maupun di kota, hanya pelaksanaannya agak berbeda, pada masyarakat desa, sebagai produsen diharapkan memproduksi semua kebutuhan pangannya sehingga ketahanan pangannya dapat terjaga sepanjang musim, sepanjang tahun, yang ditunjukkan adanya peningkatan kesehatan. Makanan yang dikonsumsi berasal dari hasil produksinya yang memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, sehingga apa yang diproduksi meliputi bahan baku makanan sehari-hari seperti padi, sayuran, hewan, rempah, buah-buahan maupun susu. Diharapkan dalam satu desa sebagian petani menanam padi, sebagian lagi menanam sayuran, buah-buahan, dan sebagian lagi beternak unggas, sapi pedaging maupun perah untuk diambil susunya. Kebijakan pemerintah yaitu memberi subsidi untuk setiap desa membangun lumbung padi guna menjaga ketahanan pangan di setiap

desa. Lumbung padi tidak hanya dimanfaatkan untuk menyimpan padi tetapi digunakan untuk penyimpanan hasil pertanian yang lain yang dibutuhkan masyarakat sepanjang musim maupun sepanjang tahun.

Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) merupakan salah satu upaya dalam menghadapi lonjakan pangan dunia. Program ini dikembangkan dengan memanfaatkan petak lahan pekarangan untuk tanaman produktif yang dibutuhkan sehari-hari bagi keluarga dan memberdayakan potensi pangan lokal. Tujuan dari pengembangan rumah pangan lestari adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengembangkan ekonomi produktif dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat. Program ini diharapkan menjadi gerakan dari dan untuk masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan mulai tingkat dusun sampai dengan tingkat rumah tangga bekerjasama dengan ibu-ibu Tim Penggerak PKK ataupun anggota Kelompok Wanita Tani (KWT). Sedangkan instansi pemerintah hanya berfungsi sebagai motivator, fasilitator dan stabilisator terhadap gerakan tersebut.

Prinsip utama pengembangan KRPL adalah mendukung upaya: (1) Ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, (2) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (3) Konservasi tanaman pangan untuk masa depan, (4) Peningkatan kesejahteraan keluarga. Pengembangan KRPL ini diimplementasikan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, dengan menerapkan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman pangan, tanaman obat keluarga (toga), budidaya ikan, dan ternak. Agar upaya tersebut terus berkelanjutan (lestari), maka perlu didukung dengan pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD) atau Kebun Bibit Kelurahan (KBK), yang dapat mensuplai kebutuhan benih/bibit anggota masyarakat yang menerapkannya secara berkelanjutan.

Saat ini upaya pemanfaatan lahan pekarangan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dengan menggerakkan kembali budaya menanam di lahan pekarangan. Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan dengan adanya pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan kepada kelompok wanita tani. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan anggota kelompok wanita tani sebagaimana tujuan

pemberdayaan pada UU No 19 Tahun 2013, bahwa pemberdayaan wanita tani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja dari wanita tani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu bersaing dan berdaya saing tinggi (Kementan 2013).

Bagaimana dengan masyarakat kota, sebagai konsumen, bagi masyarakat menengah ke atas kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako tidaklah berpengaruh, akan tetapi bagi masyarakat menengah ke bawah, kenaikan harga sembako ditanggapi dengan mengurangi jumlah dan jenis yang dikonsumsi. Dampaknya adalah banyak anak balita yang mengalami rawan gizi yang berada di perkotaan, secara keseluruhan jumlah penderita rawan gizi seluruh Jawa Barat mencapai 7337 balita. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini terjadi terutama karena menurunnya daya beli masyarakat, pengurangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi sehingga banyak balita yang menderita rawan gizi baik dari jenis Marasmus maupun Kuarsiorakor.

Hasil wawancara dengan para ibu rumah tangga yang menjadi anggota di Posyandu, menunjukkan daya beli yang menurun mengakibatkan mereka hanya membeli bahan baku yang terjangkau saja, sehingga dapat makan sepanjang hari. Kebutuhan balita terhadap protein hewani untuk pertumbuhan dan perkembangannya, kurang diperhatikan, sehingga terkadang asupan utamanya hanya sumber karbohidrat yang murah harganya. Hal ini dapat diatasi dengan cara memberi penyuluhan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bercocok tanam kacang-kacangan sebagai sumber protein, atau memelihara beberapa ekor ayam atau ikan sebagai sumber protein hewannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ditinjau dari sisi lahan, masyarakat kota tidak mempunyai lahan seperti masyarakat desa, yang pekarangan sekitar rumahnya masih relatif luas. Oleh karena itu salah satu kebijakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota dapat dilakukan pembinaan pada masyarakat kota tersebut melalui pembentukan kelompok tani wanita kota atau kelompok wanita tani (KWT) adalah sekumpulan ibu-ibu rumahtangga yang bergabung dan tertarik untuk berusaha tani dengan

memaksimalkan pengelolaan lahan-lahan marjinal atau sekitar rumahnya terutama untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari.

Kelompok wanita tani, adalah kelompok ibu-ibu yang mempunyai pandangan yang sama dalam bidang pertanian, untuk memanfaatkan dan memberdayakan segala sesuatu yang ada di sekitar rumahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangannya. Kelompok wanita tani bertanam dengan menggunakan media hidroponik yang memanfaatkan paralon, wadah botol minuman, jerigen yang diletakkan di pinggir rumah bahkan di atap rumah, tergantung jenis tanamannya. Beberapa komoditi yang dapat ditanam seperti sosin, tomat, cabe, daun bawang, wortel, seledri, pakcoy, bayam maupun kangkung dengan cara tumpang sari sehingga pemanenannya untuk memenuhi kebutuhannya.

Jenis kelompok wanita tani dapat dibentuk berdasarkan lokasi tempat tinggal dalam satu RT atau RW, sehingga setiap 15-20 ibu-ibu yang terlibat dijadikan satu kelompok, atau karena tergabung dalam satu posyandu, dijadikan dalam satu kelompok sehingga memudahkan dalam pembinaan. Kedekatan lokasi maupun kesamaan dalam posyandu tersebut dapat memacu mereka untuk konsisten dalam kegiatan kelompoknya, kesamaan dalam pandangan, kebutuhan maupun sosialnya membuat mereka akan bersatu dan bergotong royong dalam kelompoknya.

Sebagai contoh pembentukan “ Kawasan Rumah Pangan Lestari” yang terdiri dari ibu-ibu satu RT, yang dipimpin oleh ibu ketua RT, berbekal kenceng RT, yang dimanfaatkan untuk membeli beberapa jenis benih, kemudian disemaikan bersama, dibagikan dalam bentuk bibit untuk masing-masing rumah, dipelihara oleh setiap rumah, dan ketika panen, sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual bersama yang hasilnya dapat digunakan untuk modal bercocok tanam kembali. Kebersamaan dalam memelihara tanaman, walaupun mereka bukan petani dapat diatasi dengan saling kunjung untuk saling membantu jika terjadi permasalahan dengan tanamannya. Kedekatan lokasi yaitu satu RT, memotivasi mereka untuk terus berusaha dan saling tolong, sehingga dalam satu RT dapat maju bersama.

Jenis sayuran yang dapat diusahakan adalah jenis tanaman yang dikonsumsi sehari-hari seperti sawi, daun bawang, pak coy, kangkung, tomat, cabe, paprika, bayam, mentimun, seledri, wortel, selada. Jenis

buah-buahan yang diusahakan adalah melon, strawberry, jeruk buah, mangga. Jenis bumbu yang dapat diusahakan adalah jahe, kencur, kunyit, laos, honje. Jika mempunyai kelebihan lahan 1 x 1 Meter dapat diusahakan memelihara ikan atau ayam petelur. Jumlah penanaman hanya sedikit, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga uang yang digunakan untuk membeli sayuran atau buah atau rempah dapat digunakan untuk membeli sumber protein hewani seperti susu, ikan, daging, telur yang agak susah diusahakan di lahan yang sempit serta rumah berdekatan seperti di kota.

Dengan demikian kelompok wanita tani di kota, adalah kelompok tani yang mengelola usaha tani rumah tangganya, minimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga bukan sebagai petani produsen. Jika ada kelebihan dalam usahanya dipasarkan bersama dengan tetangganya dengan menitipkan di warung yang terdekat. Jenis pembinaan yang diberikan kepada kelompok tani wanita kota agak berbeda, karena keterbatasan lahan serta perbedaan jenis kebutuhan. Sebagai gambaran lokasi yang padat penduduk pembinaannya berbeda dengan lokasi yang penduduknya masih jarang, demikian pula jenis komoditi yang diusahakan. Daerah yang padat penduduk tidak dilakukan pemeliharaan hewani karena dapat menimbulkan polusi udara, yang mengganggu kesehatan lingkungan yaitu tetangganya.

Beberapa tahapan dalam pemberdayaan kelompok wanita tani di kota dengan membentuk Model Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan informasi awal**, tentang lokasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelompok sasaran.
2. **Pembentukan kelompok**: kelompok sasaran adalah rumahtangga atau kelompok rumah tangga dalam satu rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) dan atau satu dusun/kampung. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.

3. **Sosialisasi**, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Sosialisasi dilakukan pada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait, sosialisasi ini didampingi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping.
4. **Penguatan kelembagaan kelompok**: dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok:
 - a. Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah
 - b. Menaati keputusan yang telah ditetapkan bersama
 - c. Memperoleh dan memanfaatkan informasi
 - d. Bekerja sama dalam kelompok (sifat gotong royong)
 - e. Bekerja sama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok lainnya
5. **Perencanaan kegiatan**: melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran dan obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berdasar sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa (KBD), serta pengelolaan limbah rumah tangga.
6. **Pelatihan**: dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang, jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayur, toga, teknik budidaya ikan dan ternak, pembenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga.
7. **Pelaksanaan**: dilakukan oleh kelompok tani wanita kota dengan pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan oleh penyuluh pertanian. Secara bertahap, pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konversi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa dan peningkatan kesejahteraan.
8. **Pembiayaan**: bersumber dari kelompok masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan dana lain yang tidak mengikat.
9. **Monitoring dan evaluasi** dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan dan menilai kesesuaian

kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan. Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok, evaluator juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu pemberdayaan wanita dan pemanfaatan lahan marginal maupun lingkungan rumah tangga terutama dalam bidang pertanian. Berbagai teknik budidaya dapat diterapkan untuk mengatasi lahan yang sempit seperti hidroponik, tumbulampot, aeroponik, yang hasilnya minimal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah dan jenis gizi yang dibutuhkan oleh keluarga, dan jika mungkin dijual bersama kelompok sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan bibit maka dibentuk KBD (kebun bibit desa atau KBK (kebun bibit kelurahan).

Dukungan kepala Desa, sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi keberadaan KBD maupun KBK, sehingga program KRPL dapat berjalan yang membantu ketahanan pangan keluarga. Di kota Bandung kegiatan ini yaitu memotivasi masyarakat bercocok tanam telah berjalan dan menjadi agenda rutin pelatihan bagi ibu-ibu yang ber KTP kota Bandung untuk mengikuti pelatihan hidroponik, dan pembagian bibit rutin bagi masyarakat diselenggarakan bersamaan dengan *Car Friday* atau *Bandung Agree Market*, pada minggu-minggu yang telah ditetapkan.

BAB II

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A. Konsep Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan adalah sebuah perubahan yang direncanakan (*intended change*) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan. Beberapa kebutuhan dalam pembangunan: 1) kemauan pemerintah, 2) Partisipasi yang aktif dari masyarakat, 3) kelompok minoritas yang aktif dan kritis, 4) seseorang sebagai pemimpin dan pelopor perubahan (*agent of Change/Agent of Development*)

Empat (4) kualitas manusia yang mendukung dalam proses pembangunan:

1. *Diligence* yaitu sikap mental yang rajin belajar.
2. *Thrifty* yaitu sikap mental yang hemat
3. *Self in help* yaitu sikap mental yang percaya pada usahanya sendiri untuk mampu menolong dirinya sendiri.
4. *Cooperation* yaitu sikap mental mampu bekerja sama dengan orang lain untuk meraih tujuan bersama.

Dalam kegiatan pembangunan akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih luas adalah perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial yaitu suatu perubahan dalam keragaman jaringan kehidupan sosial atau masyarakat sosial. Perubahan sosial mencakup

perubahan dalam hubungan manusia dengan manusia antara lain struktur organisasi sosial atau fungsi organisasi sosial.

Latar belakang terjadinya perubahan dalam masyarakat antara lain adalah: 1) adanya ketidakpuasan terhadap suatu keadaan dan adanya niat masyarakat untuk memperbaharui, 2) Tampilnya seorang tokoh yang mampu membaca keinginan masyarakat dan mampu mengajukan program cara penyelesaian masalah tersebut, 3) seorang tokoh yang mempunyai program dengan tujuan operasional maupun idealnya, 4) waktu yang tepat untuk melakukan perubahan yang didorong oleh semua pihak.

Perubahan yang berasal dari keinginan masyarakat sendiri merupakan faktor pendorong yang kuat untuk terjadinya suatu perubahan pada masyarakat, sedangkan faktor yang berasal dari luar merupakan faktor yang mempermudah pelaksanaan perubahan. Beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial antara lain:

1. Kebutuhan aspek ekonomi
2. Kebutuhan aspek spirituil
3. Kebutuhan aspek sosial budaya

Membangun masyarakat berarti merubah pengetahuan, sikap maupun ketrampilan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka mengikuti kegiatan pembangunan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kebodohan, ketertinggalan maupun keterpurukan. Kemajuan pembangunan di segala bidang terutama perkembangan teknologi mengakibatkan masyarakat harus mengikuti sesuai dengan kebutuhannya.

Pengembangan secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan, memperbesar kemampuan masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat dibangun untuk kemajuan fisik (materi) dan kemajuan non materi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan). Bangsa Indonesia menyadari bahwa kualitas sumber daya manusianya rendah, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi adalah melalui program penyuluhan. Dampak dari rendahnya kualitas masyarakat yaitu menimbulkan tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (2012) total masyarakat Jawa Barat 44,4 juta jiwa, dengan pemetaan

tingkat kesejahteraan yang rendah antara lain ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan sebesar 4,48 juta jiwa (10,09 %). Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan, maka penduduk miskin untuk daerah perkotaan sebanyak 2.576.100 orang (8,84%) terhadap jumlah penduduk perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan sebanyak 1.901.430 orang (12,48%) terhadap jumlah penduduk pedesaan.

Rata-rata pendidikan masyarakat Jawa Barat hanya 6,8 tahun, angka partisipasi di Jawa barat hanya 47% di tingkat SMA dan 10% ditingkat perguruan tinggi. Berdasarkan informasi dari Pusat data dan Analisa Pembangunan (Puslitbang) Jawa Barat tersebut bahwa jumlah angka buta aksara tahun 2012 untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 1.072.160 jiwa. Jika di akumulasi dari jumlah penduduk secara keseluruhan maka jumlah buta aksara ini masih sangat tinggi.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kemampuan ekonomi yang semakin baik, maka masyarakat Jawa Barat terus berupaya untuk memenuhi pangannya dari hasil produksi sendiri, sekaligus mendukung pemerintah untuk swasembada padi, jagung dan kedelai tahun 2015, serta komoditas lainnya tahun 2017 (Heryawan A., 2015). Saat ini Jawa Barat sebagai lumbung padi dengan kontribusi sebesar 17% terhadap produksi padi nasional dengan produksi (dalam juta ton GKG) tahun 2011 sebesar 11,63, tahun 2012 sebesar 11,27, tahun 2013 sebesar 12,08 dan tahun 2014 sebesar 11,64. dengan jumlah produksi tersebut maka kebutuhan beras di Jawa Barat dapat terpenuhi.

Data produksi padi jagung dan kedele di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Kurva Produksi Padi (Juta Ton) dari Tahun 2011-2014



Tabel 2.2.
Kurva Produksi Jagung (Juta Ton) dari Tahun 2011-2014



Tabel 2.3.
Kurva produksi kedele (juta ton) dari tahun 2011-2014



Berdasarkan hasil evaluasi PPLS 2011, dari 5.954 Desa di Jawa Barat, ditemukan 813 Desa masuk kategori Desa Miskin sehingga rawan pangan, beberapa indikator terjadinya kerawanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih sereal
2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
5. Angka Harapan Hidup saat lahir
6. Persentase balita tinggi kurang (*stunting*)
7. Persentase Perempuan buta huruf
8. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
9. Persentase keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan

Untuk menangani daerah rawan pangan tersebut maka intervensi pemerintah Jawa Barat dalam pengendalian kerawanan pangan melakukan beberapa kebijakan yaitu:

1. Lumbung Pangan Masyarakat
2. Lembaga Akses Pangan Masyarakat
3. Pemanfaatan Lahan pekarangan/Lingbasrangan.
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
5. Penyaluran CPPD (cadangan Pangan Pemerintah Daerah)

Lumbung Pangan Masyarakat adalah salah satu kegiatan pemerintah melalui pembangunan lumbung padi di setiap desa, untuk menjamin ketahanan pangan desa tersebut, setiap desa di beri insentif modal untuk membantu biaya pembangunan lumbung desa. Sedangkan pengisian lumbung ditetapkan secara musyawarah oleh semua warga desa, sebagai contoh hasil musyawarah, setiap panen, bagi petani yang mempunyai lahan 200 M², diwajibkan menyetorkan 2 ikat padi untuk simpanan di lumbung desa. Selanjutnya siapapun warga desa mempunyai hak untuk mendapatkan pinjaman padi dan mengembalikan saat panen raya.

Lembaga Akses Pangan Masyarakat adalah satu lembaga yang ada di setiap desa yang membantu dalam perencanaan maupun pengaturan pangan di desa. Perencanaan berkaitan dengan kebutuhan pangan dan jenis pangan yang dibutuhkan, sedangkan pengaturan berkaitan dengan jumlah dan jenis yang harus diproduksi serta penyaluran pangan yang lain, seperti bantuan pangan dari pemerintah. Sebagai contoh penyaluran beras miskin, penyaluran M-ASI, penyaluran PMTAS dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Lahan Pekarangan, merupakan program pemerintah untuk terus memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangannya sendiri maupun lahan-lahan kosong serta lahan marginal untuk bercocok tanam dengan tanaman obat maupun tanaman pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan maupun pangan keluarga. Untuk memotivasi masyarakat maka keberadaan kebun keluarga tersebut dijadikan salah satu item penilaian lomba PKK, sehingga setiap RT/RW berusaha membangun pekarangannya dengan tanaman-tanaman yang subur.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dilakukan dengan cara adanya kebijakan tentang aturan penanaman di setiap desa, bahwa setiap desa perlu mengatur pola tanam dengan tanaman makanan

pokok dan makanan pendamping, sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada kemandirian pangan desa itu sendiri. Adanya lumbung desa merupakan akses menuju kemandirian pangan, demikian pula dukungan pola pengaturan tanam dapat membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Penyaluran CPPD dilakukan melalui BULOG dalam rangka mempermudah akses penerimaan bantuan sehingga tepat sasaran dan tepat kegunaan.

Penugasan pengelolaan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) 7 komoditas (beras, gula, kedelai, jagung, cabe merah, daging sapi dan bawang merah) diberikan kepada BULOG sebagai bagian dari tugas publik Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)⁷ Komoditas Pemerintah sekaligus untuk memperkuat posisi BULOG dalam tata niaga komoditas yang selama ini sudah terbentuk cukup kuat

Prinsip pengawasan 7 komoditas tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (UU Pangan No 18/2012 pasal 28 ayat 1
2. BULOG menjaga harga tingkat produsen (**dengan penetapan Harga Dasar**) dan konsumen (**dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi**)
3. BULOG mengelola cadangan tertentu milik Pemerintah (**CPP dengan mendapatkan margin fee penugasan**) dan menguasai stok operasional yang menguntungkan dalam pengelolaannya
4. BULOG berperan sebagai *single gate impor* dalam penentuan jumlah dan jenis komoditas yang akan diimpor
5. Penugasan/kebijakan ini bersifat kontinyu, tidak ad hoc, dan untuk kepentingan masyarakat

B. Konsep Pembangunan Masyarakat Pertanian

Komunikasi pembangunan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat pertanian, kegiatannya dapat dilakukan melalui penyuluhan, oleh karena itu penyuluhan merupakan proses komunikasi pembangunan yang bertujuan: 1) menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan, 2) meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu fisik, mental,

inteligensia, ekonomis dan non ekonomis, 3) menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi (mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan).

Pembangunan masyarakat pertanian adalah usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan perubahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan bidang pertanian. Pembangunan masyarakat pertanian yaitu pembangunan yang memihak pada petani atau masyarakat pertanian. Ada lima (5) syarat pokok pembangunan pertanian antara lain: 1) ketertinggalan dalam bidang teknologi pertanian harus segera diperbaiki sehingga kemajuan dalam bidang pertanian tidak terhambat 2) pemasaran hasil, penyaluran hasil pertanian harus sudah disiapkan agar pemasaran lancar, sehingga petani tidak rugi karena permasalahan pemasaran. Kerja sama dengan industri merupakan salah satu kerja sama dalam bidang pemasaran hasil pertanian, atau membantu mengolah sendiri hasil pertanian sehingga dijual dalam bentuk makanan setengah jadi atau makanan olahan membantu meningkatkan pendapatan, 3) tersedianya sarana produksi yang utama adalah benih/bibit, pupuk, pestisida adalah sarana utama yang tersedia agar usaha tani tidak terhenti, 4) pengangkutan, tersedianya sarana prasarana untuk pengangkutan hasil dilakukan untuk menghindari hilangnya hasil panen selama perjalanan, 5) perangsang produksi pertanian, yaitu tersedianya teknologi yang mendukung pertanian berproduksi dengan baik misalnya hormon maupun vitamin.

Visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian melalui pertanian industrial sebagai sasaran jangka panjangnya, misi pembangunan pertanian adalah:

1. Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing
2. Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri
3. Terciptanya kesempatan kerja secara penuh bagi masyarakat pertanian
4. Terhapusnya masyarakat pertanian dari kemiskinan dan tercapainya pendapatan petani US\$ 4500/kapita/tahun.

Sedangkan visi pembangunan pertanian hingga tahun 2025 yang hendak dicapai yaitu terwujudnya sistem pertanian industrial yang dapat dicapai dengan melakukan beberapa strategi kebijakan yaitu:

1. Membangun basis bagi partisipasi petani
2. Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumber daya insan pertanian yang berkualitas
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infra struktur pertanian
5. Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian yang tepat guna
6. Mewujudkan sistem inovasi pertanian
7. Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani
8. Mewujudkan sistem usaha tani bernilai tinggi melalui intensifikasi, diversifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan
9. Mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan
10. Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh
11. Menerapkan produk pertanian dan manufaktur yang baik
12. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berpihak kepada petani dan pertanian.

Pemerintah telah menyadari bahwa kedaulatan pangan itu sangat penting, selain energi, karena pertanian memiliki peran yang sangat strategis yaitu: 1) penyedia pangan, 2) penyerap tenaga kerja, 3) penghasil devisa, 4) penahan inflasi dan 5) penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu konsep dalam pembangunan pertanian meliputi:

1. Pertumbuhan perekonomian nasional (*Pro growth*)
2. Penciptaan lapangan kerja (*Pro job*)
3. Pengurangan kemiskinan (*Pro poor*)
4. Pelestarian lingkungan hidup (*Pro environment*)

Untuk mendukung program pemerintah dalam bidang pembangunan pertanian maka kebijakan DPR RI (2015) akan selalu mendukung Program Pemerintah apabila bertujuan pada kemajuan pertanian dan petani melalui:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, lumbung, jalan desa, dan jalan usaha tani.
2. Jaminan penguasaan lahan produktif.
3. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
4. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.
5. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
6. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah.
7. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.

Selanjutnya DPR RI Melalui Komisi IV Juga mendorong pemerintah Untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan melalui:

1. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usaha tani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.
2. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM.
3. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi.
4. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.
5. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional

Kebijakan tersebut perlu dukungan masyarakat secara penuh agar tercapai cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia, dukungan pemerintah yang lain pada perlindungan dan pengembangan produk pangan melalui kebijakan DPR RI yang mendukung kinerja semua pihak pada:

1. Penguatan sistem perkarantina pertanian.
2. Penelitian dan pengembangan berbasis sumber daya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.
3. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota.
4. Kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non-tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (*HPP*), dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) pupuk bersubsidi.
5. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
6. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*.

Selama ini perkembangan sektor pertanian masih kurang baik, berbagai permasalahan yang muncul seperti harga pupuk, benih, iklim, perubahan lahan menjadikan sektor pertanian kurang berkembang, persoalan mendasar di sektor pertanian yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.
3. Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0.5 Ha).
4. Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional.
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani.
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.
7. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi.
8. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.
9. Rendahnya nilai tukar petani (NTP).
10. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.
11. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dapat diminimalkan dengan penyelesaian satu persatu yang didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan pertanian seperti yang dikatakan oleh Pasluddin A.A., 2015, komitmen legislatif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan telah menyadari bahwa hampir 10 tahun terakhir, berbagai negara termasuk Indonesia menyadari bahwa ancaman dan tantangan terbesar umat manusia adalah Sektor Pangan dan Energi. Mengapa sektor pertanian sangat penting karena sektor pertanian adalah: 1) Penyedia pangan, 2) Penyerap Tenaga Kerja, 3) Penghasil devisa, 4) Penahan inflasi dan 5) Penggerak Pertumbuhan Ekonomi. Diharapkan melalui pembangunan masyarakat pertanian maka dapat terjadi pertumbuhan perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat pelaku usaha pertanian, merupakan kunci sukses dalam memajukan pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan bagi negara yang artinya secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian. Pembangunan pertanian artinya pembangunan yang memihak kepada petani, hasilnya adalah masyarakat petani menjadi maju dalam ilmu pengetahuan, sikap maupun ketrampilan dalam menjalankan usaha taninya, sedangkan dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga petani yang ditandai dengan peningkatan pendidikan, kesehatan maupun pendapatannya.

Kebijakan pemerintah Jawa Barat (2015) adalah menggandeng TNI dalam rangka pembangunan pertanian dengan konsep sebagai berikut:



Gambar 2.4.
Peranan TNI dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat
(Sumber Seminar Lemhanas 2015)

Dari gambar 2.4, menunjukkan bahwa untuk memperlancar jalannya pembangunan di Jawa barat maka keterlibatan TNI sangatlah diperlukan mulai dari

1. Pengawasan Perda Tata Ruang (Perda 27 tahun2012)

Pengawasan Perda tata ruang sangatlah diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan tata kelola daerah yang menyalahi konsep tata ruang yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, yang sering terjadi adalah perubahan tanah sawah atau tanah produksi menjadi bangunan, sehingga mengurangi luas sawah, pembangunan perumahan, pertokoan, jalan, penebangan hutan, yang tidak searah dengan rancangan pembangunan.

2. Pengawasan Gerakan Tanam dan Panen Komoditi Padi, Jagung dan Kedele

Keseragaman dalam tanam dan panen diharapkan dapat mendukung swa-sembada ke tiga komoditi yaitu padi, jagung dan kedele yang merupakan kebutuhan pokok agar dapat mendukung ketahanan pangan. Para petani cenderung akan menanam tanaman yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi, tetapi dengan pengawalan yang ketat, maka perencanaan penanaman dan panen dapat diseragamkan dan mencegah terjadinya rawan pangan di suatu daerah dan swa sembada di daerah lainnya.

3. Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT (Operasi Pasar Terpadu)

Gerakan pengendalian ini terutama untuk menjaga kestabilan harga di pasar sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah dalam keadaan panen maupun paceklik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ditinjau dari petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen. Para TNI mencegah adanya penyimpanan ke 3 komoditas sehingga barangnya langka. Kelangkaan barang menyebabkan harga menjadi naik, sehingga masyarakat tidak mampu membeli, yang menimbulkan kekurangan makan yang berdampak rawan gizi,

4. Pengawalan Distribusi Pupuk, Benih dan Hasil Panen

Pengawalan distribusi pupuk dan benih sangatlah dibutuhkan petani dalam rangka menjaga keberadaan saprodi, pada musim tanam jika salah satu saprodi langka, maka dampaknya adalah menurunnya produksi tanaman sehingga tidak dapat memenuhi target dalam mendukung swa sembada pangan. Kebutuhan pupuk maupun benih sampai pelosok desa perlu pengawalan sehingga petani mendapatkan dalam tepat waktu dan tepat jumlah. Pengawalan distribusi hasil panen terutama menjaga pemerataan pangan di seluruh Jawa Barat, distribusi dari daerah produsen ke daerah konsumen perlu pengawalan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang menimbulkan ke tidak-tersediaan padi, jagung maupun kedele secara merata.

5. Pengawalan Ketersediaan Air di Tingkat Petani Terutama di Pintu-pintu yang dikuasai Pihak Tertentu

Ketersediaan air menjamin kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, jika terjadi kekurangan air karena adanya pihak yang sabotase pengairan maka tanaman akan mengering dan mati yang berdampak pada kegagalan panen. Kegagalan panen berdampak pada tidak tercapainya swa sembada pangan, ketahanan pangan maupun

rawan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan perlu dikawal dengan bantuan TNI.

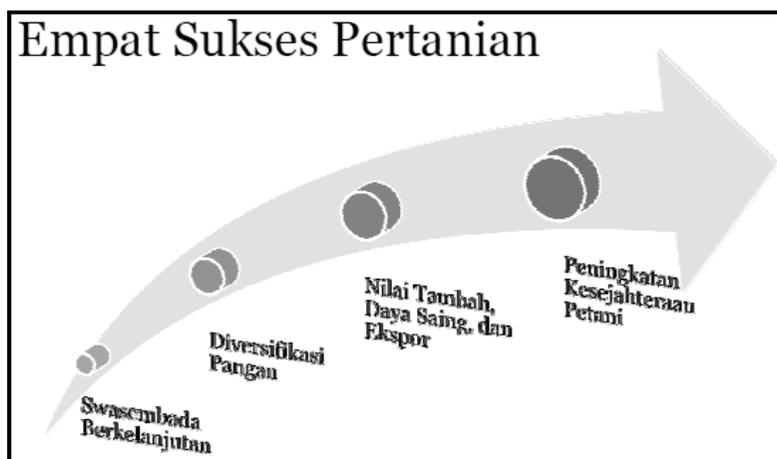
6. Pemanfaatan Lahan-lahan TNI dan Lahan BUMN Maupun Perhutani

Pemanfaatan lahan marginal tersebut dilakukan dalam rangka ekstensifikasi lokasi penanaman komoditi padi, jagung maupun kedele. Dengan bantuan TNI, maka pemanfaatan lahan tersebut dapat menambah luasan lahan penanaman sehingga meningkatkan jumlah produksi. Sampai saat ini masih banyak lahan marginal yang belum dimanfaatkan secara optimal, dengan bantuan dan kawalan TNI diharapkan dapat meningkatkan luasan lahan penanaman komoditi tersebut.

Langkah kongkrit anggota DPR (2015) dalam mengawal kedaulatan pangan adalah mendukung “ Program Revitalisasi” yang meliputi:

1. Revitalisasi lahan
2. Revitalisasi perbenihan dan pembibitan
3. Revitalisasi infrastruktur dan sarana
4. Revitalisasi sumber daya manusia
5. Revitalisasi pembiayaan petani
6. Revitalisasi kelembagaan petani
7. Revitalisasi teknologi dan industri hilir

Selanjutnya menurut Pasluddin A.A. 2015, untuk mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani yang merupakan dampak pembangunan pertanian yaitu pembangunan yang memihak petani, maka tahapan yang perlu dilakukan mengikuti gambar di bawah ini



Gambar 2.5.
Tahapan Pembangunan Pertanian

Dari gambar 2.5, menunjukkan bahwa tahapan dalam pembangunan pertanian dimulai dari swasembada berkelanjutan, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada padi jagung dan kedede, bahan lain yaitu daging dan susu belum tercapai. Swasembada komoditi yang telah tercapai harus dipertahankan dan berkelanjutan, untuk kemudian dikembangkan pada tahap diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan yang dimaksud dapat ditinjau dari sisi bahan baku yaitu komoditi yang dikonsumsi bervariasi tidak hanya nasi sebagai bahan makanan pokok, tetapi peningkatan konsumsi ubi-ubian, biji-bijian sebagai pengganti nasi, demikian pula diversifikasi pangan dalam bentuk perubahan olahan, sebagai contoh mengkonsumsi singkong dalam bentuk "Rasi" atau beras singkong.

Tahapan selanjutnya adalah nilai tambah daya saing dan ekspor, sebagai contoh adalah petani singkong yang semula dijual dalam bentuk singkong mentah atau tape, maka untuk meningkatkan nilai tambah dijual dalam bentuk Rasi, sehingga kelompok tani perlu diberi penyuluhan terus untuk membangun industri rumah tangga mengolah Rasi. Rasi merupakan bahan makanan sumber karbohidrat yang mempunyai beberapa kelebihan yaitu mengandung serat kasar yang tinggi, aman bagi penderita diabetes mellitus, mudah dicerna, sehingga dapat menjadi salah satu unggulan ekspor. Dampak dari ekspor Rasi adalah peningkatan kesejahteraan keluarga petani.

C. Konsep Pembangunan Masyarakat Pertanian Kota

Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) telah digagas oleh Bupati Kabupaten Bandung sejak tahun 2011, dengan terlebih dahulu memberi contoh dan menunjukkan pemanenan hasil usaha menanam sayuran di depan rumahnya sendiri. Hal ini menginspirasi masyarakat untuk menanam tanaman sayuran di depan rumah sendiri, keisengan masyarakat ini ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok tani, yang kemudian hal ini dilirik oleh para pengusaha untuk memfasilitasi pemasarannya asal memenuhi standar kualitas pasar yang membutuhkan.

Pengalaman salah satu ibu rumah tangga dalam menjalankan usaha tani di rumahnya sendiri melalui hidroponik sayuran, dapat menghasilkan Rp 250.000,-/minggu, belum ada pembinaan, karena hasil sayurannya diikat kemudian dijual di warung dekat rumahnya. Usaha membeli bibit cukup di toko pertanian terdekat, membuat kompos dari sisa rumah tangga, dengan pemeliharaan yang sederhana, setiap hari bisa panen dan dijual. Berdasarkan hal ini maka sudah selayaknya pertanian perkotaan mulai di pandang untuk ditindak-lanjuti sebagai salah satu sektor yang dapat dikembangkan dalam rangka mencapai kebijakan “Desa Mandiri Pangan”.

Lahirnya program KRPL dilatarbelakangi oleh upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang masih mengalami banyak tantangan. Diversifikasi pangan yang menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan masih menunjukkan kinerja yang belum sesuai harapan, dengan diindikasikan oleh pencapaian skor PPH yang dinilai masih rendah dan fluktuatif. Di sisi lain ada ketersediaan lahan pekarangan yang cukup luas dan sumber daya hayati yang melimpah, yang dinilai sebagai peluang untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan dan kemandirian terutama di tingkat rumah tangga, ketahanan pangan keluarga dapat ditingkatkan melalui rumah pekarangan pangan.

Luas lahan pekarangan secara nasional sekitar 10,3 juta/Ha atau 14 persen dari keseluruhan luas lahan pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2011). Lahan pekarangan merupakan salah satu sumber potensial penyedia bahan pangan dan gizi keluarga, mengurangi

pengeluaran belanja rumah tangga, dan menambah sumber pendapatan dengan mengusahakan komoditas komersial bernilai ekonomi tinggi. Lahan pekarangan mempunyai multi fungsi meliputi: (1) pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, (2) pelindung sumber plasma nutfah atau biodiversitas, (3) fungsi ekonomi, dan (4) fungsi sosial, dan (5) fungsi estetika.

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, di samping banyak program-program lain yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengerahan sumber daya juga harus terukur seimbang dengan solusi pemecahan masalah serta hasil yang dicapai. Maka melalui kebijakan pemerintah pertanian perkotaan melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga perlu dibangun dan dibina untuk menuju “Desa Mandiri Pangan Menuju Desa Sehat “

Dasar pijakan yang dapat ditelusuri dalam pengembangan pertanian perkotaan adalah studi literatur terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Model -KRPL antara lain: (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009; (3) Sidang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan (DKP); (4) Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, tahun 2011; serta (5) Dokumen lainnya adalah paparan/naskah/makalah oleh pejabat terkait dalam seminar/lokakarya/workshop terkait M-KRPL dan pengembangannya. Adanya dasar hukum yang menunjang adalah: UU No.7 tahun 1966 tentang Pangan; PP No.68 tentang Ketahanan pangan; PP No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; PP No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Penerapan M-KRPL telah dapat mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan, dan pengurangan pengeluaran kelompok pangan

terbesar secara berturut-turut adalah kelompok pangan sayur-sayuran, umbi-umbian, serta produk hasil ternak (telur ayam) dan ikan (ikan lele). Dampak M-KRPL terhadap pengembangan ekonomi produktif di perdesaan masih sangat terbatas, antara lain dalam bentuk usaha pembibitan, usaha pengolahan hasil pertanian, dan usaha dagang serta agrowisata.

Jumlah M-KRPL yang dilaksanakan BPTP pada tahun 2011 telah mencapai 44 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 344 unit. Jumlah M-KRPL secara keseluruhan Badan Litbang Pertanian pada tahun 2012 mencapai 35 unit. Jumlah KRPL yang telah replikasi oleh Pemda dan stakeholders lainnya berkembang pesat di Jawa Timur dan berkembang moderat hingga rendah di provinsi-provinsi lainnya. Program M-KRPL di Pacitan telah meningkatkan skor PPH dari 65,6 menjadi 77,50 atau meningkat sebesar 11,90. Skor PPH warga Mulyasari untuk peserta program 76,84 dan bukan peserta program 73,37, warga Duwet 74,88, sedangkan warga Kesetnana dan Boentuka skornya untuk peserta program 83,92 dan bukan peserta program 61,82. Skor tersebut masih jauh dari sasaran yang ditetapkan masing-masing provinsi, untuk Jawa Barat yaitu sebesar 88,1 untuk tahun 2011, dan 89,1 untuk Nusa Tenggara Timur. Dilihat dari tingkat kesenjangan dalam pencapaian skor PPH, maka kelompok pangan yang masih di bawah harapan adalah sayur dan buah, pangan hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan.

Terdapat dua model pengembangan MKRPL ke depan yaitu: (1) Pola yang secara integratif melibatkan beberapa kelembagaan, seperti Kelembagaan Gapoktan berperan dalam memasok sarana produksi (bibit, pupuk, dan obat-obatan) dan pemasaran hasil secara bersama dan Kelembagaan PKK dan kelompok dasa wisma yang mengelola M-KRPL, serta kelembagaan pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa yang berfungsi dalam mediasi dan fasilitatif; dan (2) Pola kelembagaan secara terpadu yang dari hulu hingga hilir di kelola kelembagaan PKK bersama kelompok-kelompok dasa wisma.

Kendala dan permasalahan pokok dalam implementasi dan replikasi Program M-KRPL meliputi: (1) Serangan hama dan penyakit terutama jika ditujukan untuk menghasilkan sayuran organik; (2) Kelembagaan pengelolaan KBD masih lemah, terutama dukungan modal operasional; (3) Kekurangan tenaga kerja untuk perawatan

tanaman di pekarangan pada musim kerja di sawah/tegalan/kebun, atau pekerjaan utama lain; (4) Kapasitas SDM petani dan kelompok tani/kelompok wanita tani; (5) Adanya ancaman kejenuhan warga untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber bahan pangan; (6) Tingkat mortalitas tinggi dalam beternak unggas (itik, ayam kampung, ayam Arab); dan serangan hama tikus terhadap tanaman bibit/persemaian di KBD.

Keberlanjutan Program KRPL sebagai salah satu wadah pembangunan pertanian perkotaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM baik dari aspek keterampilan teknis maupun kapabilitas manajerialnya baik petani maupun pengurus kelompok tani/kelompok wanita tani. Peningkatan keterampilan teknis peserta program KRPL dapat dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan secara partisipatif. Peningkatan kapabilitas manajerial peserta program dapat dilakukan melalui pengembangan manajemen usaha tani, manajemen keuangan, kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis dan kemitraan usaha yang bersifat saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.

Diperlukan motivator, penggerak, dan pendamping dalam pelaksanaan Program KRPL. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki pendamping pembangunan dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung program M-KRPL meliputi: (1) membangun kerja kelompok, (2) menjaga keberlanjutan program, (3) mendorong keswadayaan peserta program, (4) harus tepat sasaran, (5) menumbuhkan saling percaya-mempercayai, dan (6) prinsip pembelajaran bersinambung.

Kebijakan pemerintah melalui pembentukan KRPL, baik tingkat desa maupun kota, merupakan salah satu alternatif pembangunan pertanian, dengan sedikit perbedaan tujuan dan pelaksanaan keduanya bertujuan untuk peningkatan pendapatan, pembinaan pembangunan pertanian perkotaan melalui KRPL masih memperdulikan sisi estetika, sehingga tanaman yang diusahakan selain meningkatkan pendapatan, nampak lebih indah dan mempercantik pekarangan rumah tangganya, penggunaan paralon yang dirangkai sedemikian rupa, dapat ditempatkan di lokasi yang sempit sehingga lebih berdaya.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN

A. Konsep Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian menurut Addison H. Maunder (2010) yaitu sistem pelayanan yang membantu masyarakat melalui proses pendidikan dalam pelaksanaan teknik dan metode berusaha tani untuk meningkatkan produksi agar lebih berhasil guna dalam upaya meningkatkan pendapatan. Penyuluhan Pertanian adalah Sistem pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar para petani dan keluarganya mampu secara mandiri mengorganisasikan dirinya dan masyarakatnya untuk bisa hidup lebih sejahtera. Petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungannya untuk kesejahteraannya yang lebih baik secara berkelanjutan.

Kehadiran penyuluh pertanian sangatlah penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, oleh karena itu kebijakan pemerintah Jawa Barat (2015) adalah melakukan pemenuhan kebutuhan penyuluh pertanian antara lain:

1. Penyuluh PNS: 2.380 Orang
 - Pertanian 1.770 Orang
 - Kehutanan 418 Orang
 - Perikanan 192 Orang
2. THL TBPP 1.671 Orang
3. THL TBPPD (APBD) 1.000 Orang

4. Penyuluh Ikan bantu (P2B) 100 Orang
5. Penyuluh Swadaya 1.312 Orang

Total Penyuluh: 6.463 Orang

Jumlah Desa Jawa Barat: 5.838 Jumlah Penyuluh sudah memadai (Mengacu pada Undang 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

Keberadaan para penyuluh ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Isu-isu Aktual Permasalahan Pertanian di Jawa Barat

B. ISU-ISU AKTUAL		
PERTANIAN	PERIKANAN	PETERNAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan (Resmi) Solusi : Keringanan PBB khusus untuk Lahan Pertanian produktif 2. Kerusakan Jaringan Irigasi Primer Sekunder : <ul style="list-style-type: none"> - Baik : 48,88 % - Rusak Ringan : 22,85 % - Rusak Sedang : 15,20 % - Rusak Berat : 13,08 % Solusi : Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi 3. Kehilangan hasil 10,52 % Solusi : Penggunaan Combine harvester (alat pemanen padi), Revitalisasi RMU 4. Rendahnya akses petani terhadap permodalan Solusi : Bank Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela/Trawis dan pukat Tarik (seine net) di WPPNRI, Solusi/usulan <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan (GPS DII) untuk nelayan kecil - Penertiban Dokumen Kapal - Fasilitasi permodalan - Program Peningkatan Kehidupan Nelayan terutama SEHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Nelayan 2. BBM Bersubsidi hanya untuk Nelayan dengan kapal ukuran < 30 GT, Solusi: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Subsidi BBM utk Kapal s.d 60 GT - Konverter BBM ke BBG 3. Mahalnya Pakan Ikan, Solusi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pakan Mandiri - Pengembangan Ikan Herbivor (Gurame, Nilem, Tambakan, Tawes dll.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan daging sapi baru 30 %, - Solusi : Revitalisasi RPH/RPU, pasar hewan, pembibitan ternak lokal, Pemberdayaan kelembagaan, dan Peningkatan SDM.
		PERKEBUNAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dan produktivitas tebu menurun karena keterbatasan benih unggul. Solusinya peningkatan ketersediaan benih unggul melalui pola kemitraan dgn tenggang waktu T-1. 2. Rendemen Tebu masih rendah (6,24 %) dibawah standar nasional (8 %), Solusi peremajaan mesin pengolah dan revitalisasi pabrik gula. 3. Rendahnya produktifitas Teh (1.431 Kg/Ha/Thn.) dibawah standar Nasional (2.000 Kg/Ha/Thn).Solusi: pemantapan GPATN (Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional) 4. Pajak Impor Teh Sebesar 5% masih terlalu rendah bila dibandingkan Negara lain (Srilangka : 25%, Turki 40%). Solusi : Mengusulkan penyesuaian pajak menjadi 25 %.
KETAHANAN PANGAN		
<p>Lemahnya Daya beli masyarakat Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadangan Pangan/Lumbung pangan 2. Kepokmas 3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan 		

Sumber: Seminar Lemhanas 2015

Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa isu aktual yang menjadi masalah dalam pertanian mencakup isu pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan. Isu pertanian mencakup alih fungsi lahan, kerusakan jaringan irigasi, kehilangan hasil saat panen dan rendahnya akses petani terhadap permodalan, dengan solusinya yaitu keringanan PBB untuk lahan produktif, perbaikan jaringan irigasi, revitalisasi alat pemanen serta pembentukan perbankan pertanian.

Ditinjau dari isu perikanan beberapa permasalahan yang ditemukan adalah penggunaan alat penangkap ikan pukat, mahalnnya bahan bakar kapal penangkap ikan dan mahalnnya harga pakan ikan, solusi yang ditawarkan adalah pemberian bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan ber-GPS, penertiban dokumen kapal, fasilitas permodalan dan peningkatan SEHAT. Untuk mengatasi mahalnnya BBM dilakukan dengan subsidi pembelian BBM, serta mahalnnya harga pakan di atasi dengan pengembangan pakan mandiri serta beternak ikan herbivor.

Isu aktual pada bidang peternakan menunjukkan adanya permasalahan antara lain pemenuhan kebutuhan daging sapi baru tercapai 30% sebagai solusinya adalah revitalisasi RPH, pasar hewan, pembibitan ternak lokal, kelembagaan peternakan dan peningkatan sumber daya manusia peternakan, hal ini dilakukan dalam rangka mencapai swa-sembada komoditi daging.

Isu aktual dalam bidang perkebunan antara lain rendahnya produksi komoditas tebu sebagai bahan baku gula pasir karena kesulitan pengadaan bibit, rendahnya rendemen tebu yaitu hanya 6,24% yang normalnya adalah 8%, produksi teh yang rendah yaitu 1431Kg/Ha/Thn, yang normalnya adalah 2000Kg/Ha/Thn, serta rendahnya pajak import the yaitu 5%. Sebagai solusinya adalah persediaan bibit tebu unggul, revitalisasi mesin pengepres tebu, pemantapan GAPTN, serta peningkatan pajak import teh sebesar 25%.

Isu dalam bidang ketahanan pangan adalah rendahnya daya beli masyarakat, solusi yang ditawarkan adalah pembangunan lumbung pangan, pembentukan Kapokmas serta pengembangan “ Desa Mandiri Pangan”. Pembangunan lumbung pangan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan-pangan masyarakat desa itu sendiri, insentif dari pemerintah merupakan modal dalam pembangunan lumbung pangan desa, kegiatan ini ditindaklanjuti dengan menggandeng CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) yang dilakukan oleh BULOG, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Seiring bergesernya waktu, beserta perkembangan informasi teknologi, globalisasi maupun perkembangan permasalahan pertanian yang dihadapi maka kinerja penyuluh pertanian menjadi bergeser,

secara keseluruhan paradigma baru tentang pengertian penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Sebagai Proses Penyebar Luasan Informasi

Proses penyebaran informasi dapat terjadi jika seorang penyuluh mempunyai informasi yang baru oleh karena itu seorang penyuluh perlu aktif mencari informasi, seorang penyuluh harus aktif menyaring informasi (tidak berorientasi kepentingan tertentu, seorang penyuluh harus memperhatikan informasi dari dalam/kearifan tradisional serta seorang penyuluh perlu menyampaikan informasi tentang hak-hak politik masyarakat agar memahami keputusan politik. Dengan demikian informasi yang disampaikan seorang penyuluh adalah informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Seorang penyuluh masih terus belajar melalui berbagai media maupun praktek sendiri yang hasilnya dapat diimplementasikan secara luas oleh petani. Informasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dapat disampaikan oleh penyuluh dalam rangka membutuhkan dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagai contoh informasi pembentukan KRPL, syarat pembentukan, proses pembentukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan lain sebagainya. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa model KRPL, mampu menambah penghasilan keluarga, skala kecil mampu memenuhi jenis dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh keluarga sehingga akan tercapai "Desa Sehat", dan ketika kebutuhan keluarga telah terpenuhi dapat dijual sebagai bagian dari menambah penghasilan keluarga. Informasi kegiatan KRPL tersebut sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga agar dapat memanfaatkan lahan pekarangan dan waktunya untuk mencoba bercocok tanam.

2. Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan

Penjelasan yang disampaikan seorang penyuluh harus efektif dan efisien oleh karena itu penjelasan yang disampaikan dapat memberi penerangan berkaitan informasi terbaru, proses penjelasan penyuluhan tidak boleh searah, harus ada komunikasi timbal balik, partisipatif, kolaboratif, inovatif, penerangan diberikan kepada kelompok sasaran yang siap menerima manfaat penyuluhan. Kelompok sasaran dalam buku ini terutama adalah wanita kota yang mencoba bertani di lahan

yang sempit, melalui program KRPL, oleh karena itu dalam proses penerangan dapat dilakukan melalui gambar-gambar yang menarik dan menimbulkan motivasi untuk mencoba. Contoh penggunaan hidroponik yang bertingkat, akan meningkatkan luasan lahan penanaman, tahapan cara budidaya melalui skema gambar lebih mudah dimengerti, praktek langsung baik praktek kering maupun praktek basah, lebih mudah dipahami daripada penyampaian teori. Sehingga mereka segera dapat mengimplementasikan hasil penyuluhan yang didapat.

3. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku

Penyuluhan adalah bagian dari pendidikan non formal, tujuan pendidikan salah satunya adalah terjadinya perubahan perilaku atau sikap. Artinya setelah kelompok tani diberi penyuluhan, mereka berniat untuk melaksanakan oleh karena itu proses penyuluhan interaktif agar dapat diterima, prosesnya mulai dari perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan ketrampilan, prosesnya terus-menerus sehingga terjadi perubahan perilaku (*long life education*), faktor lingkungan harus mendukung (kebijakan pemerintah, informasi pasar, lembaga pendukung dan lain-lain).

Masyarakat petani akan mudah merubah sikap, jika telah melihat dampak positif dari perubahan tersebut, oleh karena itu berdasarkan proses adopsi suatu inovasi maka dapat dibedakan menjadi 5 tahapan yaitu: 1) **kesadaran**, petani menyadari adanya teknologi baru untuk meningkatkan produksi pertaniannya, 2) **minat**, petani mempunyai keinginan untuk mencari informasi mengenai teknologi tersebut, 3) **penilaian**, petani mulai memperhitungkan apakah perlu mencoba teknologi baru tersebut, 4) **percobaan**, petani mencoba teknologi baru tersebut, dengan jumlah yang lebih kecil, 5) **adopsi**, petani memutuskan untuk menerima dan memakai teknologi secara tetap.

Berkaitan dengan teknologi baru yaitu bercocok tanam di lahan sempit melalui hidroponik, tumbulampot atau aeroponik, kegiatan penyuluhan akan dapat merubah perilaku petani dengan menggunakan teknologi tersebut jika: 1) ada kelebihan yang akan diperoleh dengan menggunakan teknologi baru tersebut, 2) teknologi baru masih ada kesamaan/kesesuaian dengan teknologi yang telah dikuasai petani, 3)

tingkat kerumitannya adalah rendah sehingga mudah dikerjakan, 4) dapat dicoba dalam skala terbatas, 5) dan hasil percobaan dapat dievaluasi serta didiskusikan dengan orang lain.

4. Penyuluhan Sebagai Proses Belajar

Penyuluhan merupakan bagian dari pendidikan non formal, dengan ciri kurikulumnya fleksibel, tanpa jenjang, waktu fleksibel, materi sesuai kebutuhan oleh karena itu dalam penyampaian proses belajar maka metode yang digunakan adalah 1) Metode belajar orang dewasa/andragogi yang menekankan pada bagaimana orang dewasa belajar, 2) Proses belajar bersifat partisipatif, warga belajar aktif dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran, 3) Tugas penyuluh sebagai instruktur, fasilitator, *change agent*, pembimbing, pendamping, pembina sehingga lebih tahu dan dapat memposisikan dirinya, 4) Hasil belajar mampu menyejahterakan individu itu sendiri, keluarganya dan masyarakat sekitarnya sehingga proses belajar bersama. Pada proses belajar non-formal evaluasi dampak lebih ditekankan untuk mengetahui perubahan perilaku dan ketrampilan warga belajar, evaluasi dampak dapat dilakukan minimal 3 bulan setelah proses penyuluhan untuk mengetahui sejauh mana implementasi hasil penyuluhan telah dilakukan serta peningkatan pendapatannya.

5. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial

Proses penyuluhan pada dasarnya adalah merubah pola pikir kelompok tani berkaitan dengan hubungan antar individu petani itu sendiri, hubungan individu dengan kelompok serta hubungan antar kelompok tani itu sendiri oleh karena itu pada proses penyuluhan maka dapat 1) Ditujukan pada perubahan hubungan antar individu, 2) Terjadi perubahan struktur organisasi masyarakat, 3) Perubahan nilai-nilai pada masyarakat, 4) Perubahan pranata sosial seperti demokratisasi, transparansi, supremasi hukum.

Diharapkan setelah proses penyuluhan terjadi perubahan dalam cara pandang, perilaku berorganisasi, kelembagaan kelompok tani maupun kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial yang terjadi merupakan dampak dari perubahan perilaku yang terjadi setelah proses penyuluhan dan merupakan bagian dari pembangunan.

6. Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa Sosial

Proses rekayasa sosial dapat dilakukan melalui program tupoksi penyuluh, masyarakat dituntun untuk tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan hasil penyuluhan, adanya dasar partisipatif agar masyarakat tidak merasa dipaksa dan melalui program yang jelas maka terdapat rekayasa dalam perubahan sosial agar program dapat tercapai. Perekayasa dilakukan sedemikian rupa sehingga kelompok tani tidak merasa diarahkan dan dibentuk untuk mengikuti tujuan penyuluhan yang dilakukan.

Ranah penyuluhan yang dicapai adalah: 1) *To do* (membentuk masyarakat untuk melakukan sesuatu yang inovatif), 2) *To do for* maksudnya penyuluh menawarkan sesuatu (materi penyuluhan) pada masyarakat dalam usaha melakukan perubahan sosial, 3) Pengambilan keputusan oleh masyarakat, 4) tahapannya menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Implementasi penyuluhan serta tujuan penyuluhan disesuaikan dengan ranah yang ingin dicapai agar pelaksanaan penyuluhan lebih terarah.

7. Penyuluhan Sebagai Proses Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan masyarakat artinya pembangunan yang memihak masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dibangun adalah masyarakat yang lemah supaya berdaya oleh karena itu dalam penyuluhan yang dilakukan adalah 1) Memberi daya kepada masyarakat yang lemah, 2) Mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi lebih bermanfaat, 3) Arah pemberdayaan adalah masyarakat madani (beradab) dan mandiri dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraannya, 4)

Tujuan memperkuat kemampuan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui pembangunan dan pemberdayaan yang disampaikan dalam ranah penyuluhan dapat merubah sosial kelompok tani.

Pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat meliputi 1.115 kelompok.
2. Pengembangan Kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan Desa Mandiri Pangan (MAPAN) sebanyak 56 desa meliputi 7.500 RTM.
3. Pengembangan Kelompok Lingkungan Bebas Rawan Pangan pada 540 Kelompok.
4. Pengembangan Kelompok Wanita Tani melalui bantuan alat penampung ke 162 KWT.
5. Pengembangan Gapoktan melalui bantuan 5 unit RMU.
6. Mengentaskan Jawa Barat Bebas Buta Aksara.
7. Guru Bantu SD/MI dan insentif guru Diniyah sebanyak 10.000 orang.
8. Kesejahteraan 417.000 guru.
9. Pemberdayaan usaha masyarakat miskin (Piloting Lintas Sektor).
10. Jawa Barat Bersih Sehat dan Lestari (BESTARI), di DAS Citarum.
11. Pemberdayaan 14 Kelompok Usaha Tani Mitra STA.
12. Pemberdayaan 482 Kelompok Peternak.
13. Bantuan Alsintan Pra Panen kepada 2.808 Kelompok Tani.
14. Bantuan Alsintan Pasca Panen kepada 191 Kelompok Tani.
15. Bantuan Rumah Lindung/Green House kepada 24 Kelompok Tani.
16. Bantuan benih ikan/restocking sebanyak 51.250.000 ekor, induk ikan nila dan lele 5.725 paket, Kapal perikanan > 30 GT 51 unit. Bantuan jaring 2.291 piece untuk 41 kelompok.
17. Bantuan Pembuatan/Perbaikan Jaringan Irigasi kepada 560 Kelompok.
18. Pemberdayaan 415 Kelompok Tani Restrukturisasi Perkebunan Teh Rakyat (PRPTR).
19. Pemberdayaan 71 Gapoktan tingkat lanjut melalui program Penyelamatan Agribisnis teh dengan model integrasi ternak sapi-teh.
20. Peningkatan NTP perkebunan rakyat > 100 point.
21. Bantuan kepada Asosiasi Petani Teh Indonesia (Aptehindo) untuk Rehabilitasi, Intensifikasi dan Sarana Pendukung Pemasaran Produksi Teh Rakyat.
22. Pemberdayaan Kelompok Tani untuk Pengembangan Usaha Kopi Luwak.

23. Pengembangan pembudidayaan ikan/nelayan dan pengolah hasil perikanan melalui bantuan ke 695 Kelompok.
24. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pemanfaatan lahan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan luas tanam padi seluas 17.055 Ha, dengan produksi 51.165 Ton, dan luas tanam jagung seluas 544 Ha, dengan produksi 2.176 Ton.
25. Pemberdayaan LMDH pemanfaatan lahan kawasan hutan di bawah tegakan untuk meningkatkan luas tanam kopi seluas 8.000 Ha, dengan jumlah produksi 8.000 ton.
26. Pemberdayaan LMDH pemanfaatan lahan kawasan hutan di bawah tegakan untuk pengadaan pakan ternak seluas 750 Ha.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pertanian tersebut sangat tergantung kesadaran sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan ini yaitu sumber daya manusia petani itu sendiri, lembaga pemerintah yang terkait yaitu penyuluh pertanian, penentu kebijakan, kelembagaan keuangan, adanya agen yang mampu memotivasi masyarakat untuk lebih berdaya serta dukungan lain untuk tercapainya program pemberdayaan tersebut.

8. Penyuluhan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas

Penyuluhan yang terus menerus diharapkan dapat memberi 1) Penguatan kemampuan individu, 2) Penguatan kemampuan kelembagaan, 3) Penguatan kemampuan jejaring antar individu, kelompok sosial maupun organisasi atau pihak lain, 4) Diutamakan kemampuan memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan. Dengan demikian salah satu dampak penyuluhan adalah perubahan kelas kelompok tani, dari paling rendah yaitu kelompok pemula, berubah menjadi kelompok lanjut, kelompok madya dan kelompok utama. Adanya keragaman kelompok dijadikan sebagai penjaminan mutu dalam peningkatan status kelompok tersebut serta pedoman penyuluh dalam melakukan pembinaan bagi masyarakat petani.

9. Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi Pembangunan

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber (penyuluh) kepada penerima (kelompok tani), komunikasi pembangunan artinya pesan yang disampaikan adalah berkaitan dengan proses pembangunan oleh karena itu dalam penyuluhan maka 1) Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan, 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu fisik, mental, inteligensia, ekonomis dan non-ekonomis, 3) Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi (mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Komunikasi pembangunan dilakukan terus menerus dalam rangka menunjang program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sebagai contoh di Jawa Barat 2015, telah dicanangkan konsep transformasi pembangunan melalui penyuluhan seperti gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1
Transformasi Paradigma Pembangunan Jawa Barat 2015

Dari gambar 3.1, menunjukkan dalam pembangunan Jawa Barat maka diperlukan keterlibatan dan dukungan penuh dari akademisi (berkaitan dengan hasil-hasil penelitiannya), para pelaku usaha sebagai stakeholder yang memahami kebutuhan masyarakat, pemerintahan

dengan dukungan kebijakan-kebijakannya serta komunitas masyarakat luas sebagai sasaran pembangunan. Kegiatan pembangunan akan berjalan sesuai tujuan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus menerus dievaluasi dalam rangka peningkatan angka kesejahteraan, kesehatan, maupun pendidikan masyarakat.

Konsep ini telah diterjemahkan dengan memperluas keterlibatan masyarakat, dalam pembangunan Jawa Barat antara lain:

- a. Komite perencanaan yang melibatkan ke 4 elemen tersebut
- b. Badan koordinasi penataan ruang daerah
- c. Dewan riset daerah
- d. Tim advisor inovasi teknologi
- e. Tim koordinasi inovasi daerah
- f. VJPMDDM (*Vest Java Province Metropolitan Development Management*)
- g. Badan pengembangan wilayah Bandung selatan
- h. Tim ekonomi Jawa Barat
- i. TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
- j. Tim komda lansia
- k. Tim pengembangan sumber daya insani
- l. Analisis kebijakan Pembangunan
- m. Tim ekonomi kreatif
- n. Badan promosi
- o. Kuliah kerja nyata tematik
- p. Pemberian anugerah dan prakarsa inovasi kepada masyarakat Jawa barat yang telah secara nyata mendukung pembangunan di Jawa Barat.

10. Redefinisi penyuluhan pertanian

Definisi awal penyuluhan adalah pendidikan luar sekolah ditujukan pada petani dan keluarganya, agar dapat bertani lebih baik, berusaha tani lebih baik, menguntungkan demi terwujudnya keluarga lebih sejahtera. Redefinisi penyuluhan yaitu proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama, agar terjadi perubahan perilaku bagi semua yang terlibat dalam proses pembangunan demi

terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif serta sejahtera secara berkelanjutan.

Fungsi penyuluhan adalah memberi jalan pada petani untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan fungsi penyuluh adalah menimbulkan kesadaran para petani agar dengan kemauan sendiri dapat memenuhi kebutuhannya. Fungsi lain penyuluhan adalah menjembatani gap antara praktek yang dijalankan petani dengan pengetahuan yang terus berkembang, dengan demikian materi yang disuluhkan harus sesuai dengan gap atau masalah yang dihadapi petani saat ini, dalam rangka mengembangkan usaha pertaniannya.

Perubahan-perubahan yang demikian banyak dalam dunia pertanian dan para petaninya tadi harus dihadapi dengan strategi penyuluhan yang baru. Paradigma baru diperlukan untuk mampu merespon pada tantangan-tantangan baru. Sembilan unsur paradigma ini perlu dilaksanakan secara terpadu hingga menjadi sesuatu yang utuh. Keutuhan inilah yang baru, kesembilan paradigma baru tentang penyuluhan antara lain

1. Penyuluhan adalah Jasa Informasi

Bertani adalah profesi petani oleh karena itu pertanian harus dapat memberi kehidupan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya, untuk itu pertanian harus bisa lebih produktif, efisien dan menguntungkan, seorang petani harus inovatif. Untuk inovatif petani harus selalu mendapat informasi baru tentang dunia pertaniannya, Penyuluhan Pertanian berperan menjadi penyedia dan pemasok informasi yang diperlukan para petani untuk bisa bertani dan hidup lebih baik secara berkelanjutan.

2. Informasi Relevan dengan Kondisi Lokalitas

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengutamakan untuk memajukan unggulan hasil pertanian daerah sehingga Penyuluh Pertanian menjadi tanggung-jawab daerah. Kesejahteraan petani menjadi tanggung-jawab pemerintah daerah yang bersangkutan, ekosistem daerah praktis berbeda dengan daerah lainnya harus disikapi dengan kearifan lokal daerah, oleh karena itu informasi dan rekomendasi

yang diberikan oleh Penyuluh Pertanian harus sesuai dengan ekosistem dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Untuk meyakinkan petani agar mau mengikuti hasil penyuluhan maka perlu ada uji coba setempat (lokal), dengan demikian kesesuaian varietas, kemampuan tumbuh, berkembang dan berproduksi dapat diamati secara nyata, disini keterlibatan fungsi BPTP dan penghimpunan informasi yang relevan dengan kondisi lokal sangat diperlukan. Hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian yang sesuai dengan kearifan lokal daerah sangat dibutuhkan

3. Materi Penyuluhan Berorientasi Agribisnis

Usaha tani adalah bisnis oleh karena itu semua petani mencari keuntungan dalam melaksanakan usaha taninya. Sistem agribisnis terdiri dari sub-sistem hilir, *on-farm* dan hulu. Interaksi atau *linkages* antara semua sub-sistem itu harus diusahakan agar tidak merugikan petani, sebaliknya harus lebih menguntungkan petani dan berpihak pada petani. Perhitungan usaha tani dilakukan untuk meyakinkan pada petani bahwa usahanya menguntungkan, sehingga layak untuk diikuti karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

4. Gunakan Pendekatan Kelompok

Penyuluhan dilakukan dengan lebih banyak dengan pendekatan kelompok; pendekatan individual dilakukan bila sangat perlu saja karena lebih efisien dan efektif. Interaksi dalam kelompok tani sangat penting sebagai forum belajar bersama, berdemokrasi dan mengambil keputusan. ke arah kemandirian masyarakat petani yang tak tergantung pada pihak lain (penyuluh, pemerintah, dan lain lain). Untuk itu kepemimpinan diantara petani akan muncul dan berkembang, dilanjutkan dengan pembinaan oleh Penyuluh, Konsekuensinya adalah Penyuluh harus dipersiapkan dengan baik agar dapat melakukan pendekatan semacam itu. Setiap kelompok mungkin mempunyai masalah yang berbeda, sehingga penyuluh harus memahami karakteristik setiap kelompok.

5. Fokus pada Kepentingan Petani

Materi kegiatan penyuluhan adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani dalam melakukan usaha taninya, walaupun ada kepentingan lain (nasional), tetap kepentingan petani adalah yang

pertama. Eksploitasi petani harus dihentikan, materi penyuluhan bersifat dari bawah (petani) bukan dari kepentingan atasan sehingga memaksa petani menjadi obyek, tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya, jika eksploitasi petani terus dilanjutkan maka justru akan selalu menjadi beban nasional. Padahal mereka bisa menjadi andalan nasional.

Kepentingan petani wajar yaitu mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan, mendapatkan imbalan yang wajar dan adil, untuk itu penyuluh pertanian di tingkat lapangan perlu diberi otonomi agar dapat memusatkan perhatiannya pada kepentingan petani itu.

6. Pendekatan Humanistik-Egaliter

Pada proses penyuluh maka pandangan penyuluh adalah menempatkan petani sejajar dengan penyuluh dan diperlakukan secara humanistik (mahkluk yang punya martabat, dan harga diri, kepentingan, kebutuhan, pendapat, pengalaman dan kemampuan. Hentikan pandangan kepada petani sebagai lebih rendah dari penyuluh, pendekatan humanistik-egaliter akan menciptakan hubungan penyuluh-petani menjadi saling menghargai dan saling membutuhkan. Jika kepentingan petani diperhatikan, petani akan merespon secara positif kepada usaha penyuluh.

7. Kembangkan Sifat Profesionalisme

Penyuluh pertanian dalam menyampaikan penyuluhan harus tepat dan benar secara teknis, sosial, budaya dan politik. Efektif karena direncanakan dan dilaksanakan secara baik dengan dukungan tenaga ahli dan terampil, didukung pula oleh sarana yang memadai, tersedia berbagai informasi yang relevan dan terkini oleh karena itu Penyuluh mendapatkan pelatihan secara berkala tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kepentingan petani yang dinamis.

8. Utamakan Akuntabilitas

Maksudnya setiap hal yang akan dilakukan telah dipikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar proses dan hasilnya dapat di pertanggung-jawabkan. Sistem pertanggung-jawaban ini harus ada dan dilaksanakan, dan merupakan penyeimbang prinsip otonomi. merupakan bagian dari evaluasi kinerja profesional penyuluh yang menghasilkan *reward & punishment*. Merupakan pertanggung-

jawaban administrasi dan moral terhadap penggunaan dana Pemda/ rakyat. Dengan demikian seorang penyuluh pertanian mampu menyusun laporan pertanggung-jawaban dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, upaya ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat umumnya dan khususnya penyandang dana kegiatan penyuluhan.

9. Upayakan Agar Memuaskan Petani

Apapun yang dilakukan dalam penyuluhan harus diusahakan agar dapat memuaskan petani, petani akan merasa puas bila kepentingannya diperhatikan dan dipenuhi. Proses penyuluhan adalah melayani kepentingan dan kebutuhan petani, oleh karena itu program penyuluhan pertanian disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah, kepentingan dan kebutuhan petani di daerah yang bersangkutan serta materi dan cara penyajian materi itu harus memuaskan petani atau pelayanan sepenuh hati.

Tujuan penyuluhan yaitu menumbuhkan perubahan yang lebih terarah dalam aktivitas usaha tani, perubahan tersebut menyangkut:

1. Perubahan tingkat iptek
2. Perubahan tingkat ketrampilan
3. Perubahan sikap
4. Perubahan motif tindakan

Untuk menuju pertanian modern dengan ciri para petaninya penuh dinamika, aktif, fleksibel, nyata mampu mewujudkan produktivitasnya tinggi. Sedangkan tujuan penyuluhan jangka panjang adalah:

1. Peningkatan pengetahuan bagi petani
2. Memotivasi petani
3. Menyampaikan informasi terbaru bagi petani
4. Mengembangkan ketrampilan petani
5. Membentuk masyarakat petani lebih dinamis

Kegiatan penyuluhan pertanian mempunyai beberapa sasaran penyuluhan yaitu:

1. **Sasaran utama:** petani dan anggota keluarganya
2. **Sasaran penentu:**
 - a. Pejabat pemerintah (menggerakkan petani)
 - b. Peneliti (sumber informasi)
 - c. Lembaga keuangan (biaya/modal)
 - d. Produsen, penyalur, pengecer saprodi
 - e. . industri pengolah hasil pertanian
 - f. Pedagang, lembaga pemasaran yang lain
 - g. lembaga pelayanan misal biro jasa, konsultan dll
3. **Sasaran pendukung**
 - a. anggota organisasi sosial, politik dll
 - b. seniman
 - c. pemuka agama
 - d. konsumen hasil pertanian

Dengan demikian setiap penyuluh pertanian sebelum terjun ke lapangan harus memahami konsep penyuluhan pertanian, sehingga keberadaannya dapat diterima dan diikuti oleh kelompok tani sehingga kegiatan penyuluhan yang dihasilkan mampu merubah sikap, perilaku, ketrampilan petani dan keluarganya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga petani khususnya dan kelompok tani pada umumnya. Untuk mendukung program penyuluhan di berbagai bidang ini, maka Gubernur Jawa Barat (2015) mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

1. Rekrutmen Penyuluh THL sebanyak 1.000 orang dan Penyuluh POPT sebanyak 387 orang
2. Pelatihan 12.000 Kader Posyandu dan Pokja Posyandu desa/ kelurahan
3. Pemberdayaan masyarakat miskin
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat
5. Program 300 Doktor
6. Peningkatan jumlah dokter Puskesmas PONEB sebanyak 340 orang dokter umum dan dokter spesialis, PTT sebanyak 15 orang
7. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu untuk 597 Kelompok.
8. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu untuk 40 Kelompok

Diharapkan melalui kebijakan ini dapat mendukung kebijakan pemerintah desa mandiri pangan menuju desa sehat.

B. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan pertanian pada dasarnya sama dengan metode mengajar pada pendidikan non formal yaitu cara mengajar atau cara menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan sangat fleksibel tergantung situasi dan kondisi, bahkan mungkin dalam satu kali penyuluhan digunakan lebih dari satu metode penyuluhan. Implementasi metode penyuluhan pada kelompok tani sangat fleksibel, tergantung persetujuan dengan kelompok tani sebagai warga belajar, diusahakan metode penyuluhan tidak kaku, sehingga dapat menarik peserta penyuluhan untuk mau mengikuti kegiatan penyuluhan sampe selesai dan mengimplementasikan dalam kegiatan usaha taninya.

Beberapa prinsip metode penyuluhan yang dapat digunakan:

- Pengembangan untuk berpikir kreatif
- Tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan sasaran
- Setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya
- Ciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran
- Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan

Beberapa metode penyuluhan yang digunakan antara lain adalah:

1. Kunjungan Rumah dan Usaha Tani

Metode kunjungan rumah dan usaha tani dilakukan sesuai kebutuhan, biasanya hal-hal spesifik yang membutuhkan kunjungan penyuluh ke rumah petani. Kunjungan ke lokasi usaha tani ataupun ke rumah petani dapat dilakukan atas permintaan petani/kelompok tani atau atas inisiatif penyuluh sendiri. Kunjungan atas permintaan petani/kelompok tani dilakukan karena adanya permasalahan yang dihadapi petani/kelompok tani yang membutuhkan pengamatan dan evaluasi lebih seksama oleh penyuluh, dan memohon kepada penyuluh untuk memberi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sedangkan kunjungan atas inisiatif penyuluh dilakukan terutama untuk mengevaluasi dampak

dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, perkembangan usaha tani petani/kelompok tani, bahkan mengetahui perkembangan keberhasilan usaha tani para petani binaannya.

Kegiatan penyuluhan dilakukan secara langsung dengan memberikan masukan atas hasil pengamatan yang dilakukan serta diskusi secara langsung bersama dengan kelompok tani dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi, bahkan masukan secara langsung untuk pengembangan usaha tani yang dikerjakan. Jika saat kunjungan belum mendapatkan titik temu, maka kegiatan kunjungan akan dilakukan kembali dalam rangka penyelesaian masalah, kegiatan ini bersifat spesifik sehingga hanya jika dibutuhkan saja.

2. Kunjungan Kantor Kelompok Tani

Kunjungan kantor kelompok tani dilakukan oleh kelompok tani ke kantor penyuluh pertanian, dengan terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang menurut kelompok tani akan diperoleh jawabannya melalui penyuluh pertanian. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara langsung dengan memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kelompok tani. Dan Karena kunjungan ke kantor penyuluhan maka banyak nara sumber dari penyuluh yang dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan pengamatan, kelompok tani yang mau berkunjung ke kantor penyuluh tersebut adalah kelompok tani yang mau maju sehingga tidak pasif menunggu kehadiran penyuluh.

3. Surat-menyurat

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara surat menyurat terjadi secara perorangan maupun kelompok tani. Disini petani maupun kelompok tani berkirim surat kepada penyuluh pertanian, berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yang membutuhkan pendapat penyuluh pertanian. Karena lokasi antara rumah petani dan kantor penyuluhan yang berjarak sangat jauh maka kegiatan surat menyurat ini sangat membantu dalam penyampaian kegiatan penyuluhan.

Di era teknologi saat ini surat menyurat dapat dilakukan melalui media elektronik seperti *e-mail*, *sms*, *mms* atau media elektronik lain yang dapat dioperasikan baik oleh petani/kelompok tani dan penyuluh sebagai nara sumber. Kegiatan penyuluhan melalui surat menyurat ini

sangat membantu baik petani maupun penyuluh dalam menyampaikan materi penyuluhannya, lebih efisien dalam waktu, efektif dan tepat guna sesuai pertanyaan petani.

4. Magang pada Usaha Tani yang Lebih Maju

Magang dilakukan dengan cara petani/kelompok tani mengikuti kegiatan pada kelompok tani yang usaha taninya lebih maju. Kegiatan magang merupakan salah satu kegiatan penyuluhan dengan cara transfer langsung keilmuan yang dikehendaki, pengalaman secara langsung diperoleh ketika petani ikut mengerjakan secara langsung kegiatan tersebut. Kegiatan penyuluhan terjadi dengan praktek langsung di lokasi magang yang diharapkan setelah kegiatan magang berakhir, maka petani/kelompok tani dapat mengimplementasikan ilmu yang diserap dalam rangka mengembangkan usaha tani yang dikelolanya.

Ditinjau dari sisi petani/kelompok tani yang mengikuti magang maka kegiatan ini sangat menguntungkan karena mereka tidak hanya mendapatkan teori tetapi kegiatan ketrampilan sesuai dengan yang diminati dalam magang. Tetapi ditinjau dari sisi petani/kelompok tani lokasi magang maka beberapa kerugian dapat terjadi seperti kemungkinan kegagalan dari peserta magang, kerugian biaya maupun waktu karena harus melayani pemagang.

Tingkat keberhasilan pada kegiatan penyuluh melalui magang adalah sangat tinggi, petani/kelompok tani akan bersedia mengikuti kegiatan karena sesuai kebutuhannya dan melihat kegiatan di lokasi magang yang sedemikian baik dapat menumbuhkan motivasi untuk mengimplementasikan di lokasinya sendiri.

5. Perlombaan Antara Kelompok Tani

Perlombaan antar kelompok tani adalah metode belajar untuk meningkatkan motivasi belajar kelompok tani, melalui perlombaan mereka akan belajar menguasai ilmu agar dapat menjawab pertanyaan pada saat perlombaan. Perlombaan dilakukan dengan mengatur kelompok-kelompok tani menjadi beberapa regu yang dipertandingkan secara setengah kompetisi, baik pengetahuan teori maupun keterampilannya. Pada babak final akan diperoleh peserta yang akan memperebutkan juara 1, juara 2 dan juara 3, berdasarkan total nilai yang diperoleh saat perlombaan. Kegiatan ini secara tidak langsung

menambah wawasan pengetahuan maupun ketrampilan pada semua peserta yang hadir dalam perlombaan, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara tidak langsung, mudah ditangkap dan dipahami oleh para petani.

Perlombaan antar kelompok tani dapat juga dilakukan dengan memperlombakan hasil pertaniannya, terlebih dahulu ditentukan kriteria penilaiannya. Atribut yang digunakan untuk menilai misalnya berat, warna, rasa, bentuk yang diberi rank penilaian untuk memudahkan menentukan nilai. Total nilai semua atribut mutu yang telah ditetapkan dapat digunakan sebagai parameter menentukan pemenangnya. Pembelajaran yang dapat diambil adalah petani yang menjadi pemenang akan menceritakan cara budidaya yang baik sehingga produk hasil pertaniannya dapat menjadi pemenang. Salah satu ciri pembelajaran bagi orang dewasa adalah ingin segera mengaplikasikan hasil belajarnya, dan orang dewasa dapat belajar dari pengalaman yang sudah terbukti hasilnya.

6. Kursus Tani/Sekolah Lapang

Kursus tani/sekolah lapang adalah program pembelajaran dari pemerintah melalui penyuluh pertanian. Sebagai contoh Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, merupakan program pemerintah dalam pengendalian hama secara terpadu. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung di lapangan, dengan dipandu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, yang diawali dengan teori kemudian praktek secara langsung. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara terus menerus sesuai tahapan yang direncanakan, dan diakhiri dengan tahap evaluasi serta rencana tindak lanjut.

Sekolah Lapangan dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (Andragogi) karena sifatnya yang tidak formal. Proses belajar dilakukan di lapangan dimana tersedia obyek nyata berupa tanaman cabe merah yang dijadikan materi pelajaran.

Untuk menjamin proses belajar yang efisien, terarah kegiatan sekolah Lapangan dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peserta Sekolah lapangan adalah petani atau kelompok tani yang berada di wilayah kegiatan demplot.
- b. Tempat belajar adalah di lahan kegiatan budidaya cabe merah dengan mengamati perkembangan tanaman.
- c. Sekolah Lapangan dilaksanakan 3 kali pertemuan selama kegiatan
- d. Materi pelajaran pada praktek/penerapan, pengamatan, diskusi dan tukar menukar informasi dan pengalaman. Materi Pelajaran benar-benar merupakan kebutuhan petani dan disepakati bersama petani.
- e. Proses pembelajaran di pandu oleh fasilitator yang berfungsi mengarahkan proses belajar sebagai penengah dalam melakukan diskusi.
- f. Petani selaku peserta belajar memiliki hak yang sama untuk bicara dan berpendapat dan merupakan tugas fasilitator untuk menciptakan suasana harmonis dan berimbang dalam proses belajar.
- g. Pada setiap akhir proses belajar diharapkan adanya kesepakatan tindak lanjut diantaranya; kesiapan untuk menerapkan teknologi yang sudah dipelajari oleh peserta, pemecahan masalah (bagaimana dan kapan) prioritas materi pada pertemuan selanjutnya dan lain-lain.

7. Temu Wicara

Temu wicara merupakan metode dan teknik penyuluhan untuk mensosialisasikan program pembangunan pertanian dan menyamakan persepsi masyarakat tani terhadap program pembangunan pertanian. Temu wicara merupakan pertemuan dan dialog dua arah antara petani dan kontak tani dengan pejabat pemerintah dengan bahasan kebijakan pemerintah dalam membangun pertanian, serta ide, gagasan, laporan dan usulan petani kepada pemerintah. Terbukanya dialog interaktif antara pemerintah dan petani dalam temu wicara sangat besar manfaatnya bagi kedua belah pihak khususnya bagi peningkatan peran serta aktif dalam pembangunan.

Keuntungannya, 1) terciptanya kesempatan petani untuk mengetahui program dan kebijaksanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan pada khususnya, 2) terbukanya kesempatan petani untuk mengemukakan masalah-masalah, aspirasi dan pengalaman, 3) terwujudnya kesempatan bagi pemerintah untuk mengetahui aspirasi, keinginan, gagasan dan masalah-masalah petani.

Temu wicara merupakan pertemuan antara petani/nelayan dan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian serta keinginan, gagasan dan pelaksanaan pembangunan oleh petani/nelayan di lapangan. Tujuan dari temu wicara adalah: 1) Memberikan kesempatan kepada petani untuk mengetahui kebijakan pembangunan pedesaan pada umumnya dan pembangunan pertanian khususnya; 2) Mewujudkan kesempatan bagi para pejabat pemerintah untuk lebih mengenal aspirasi, keinginan, gagasan dan masalah-masalah petani/nelayan; 3) Mewujudkan situasi yang memperkuat diselenggarakannya program-program pembangunan yang berlandaskan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat; 4) Menumbuhkan motivasi pada petani/nelayan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan lebih bergairah; 5) Membuka kesempatan bagi petani nelayan untuk belajar mengemukakan masalah, pendapat dan pengalaman secara positif; 6) Membuka saluran umpan balik dari masyarakat tani kepada pemerintah.

Temu wicara dapat dilaksanakan di ruangan maupun di lapangan, baik di tingkat wilayah kerja BP3K, Kabupaten, Provinsi, maupun di Pusat. Temu wicara ini dapat diprakarsai oleh pemerintah atau petani. Temu wicara dapat dilakukan kapan saja sesuai keperluan, dan diselenggarakan oleh petugas pertanian, petugas lain atau petani/nelayan yang disetujui pemerintah. Peserta temu wicara adalah petani/nelayan dan pejabat pemerintah. Petani/nelayan yang dipilih haruslah yang mampu mengemukakan gagasan, sedangkan pejabat yang di undang adalah peserta kebijakan atau yang diberi kuasa dan bertanggung-jawab serta menguasai materi yang akan dibahas.

Tata Cara Pelaksanaan Temu Wicara: 1) Persiapan: Agar Temu Wicara dapat berjalan dengan baik, maka perlu persiapan yang baik, diantaranya menyiapkan tempat temu wicara, fasilitas dan kelengkapan yang diperlukan; menetapkan pejabat yang akan berbicara, membuat undangan untuk peserta melalui Pemda dan undangan kepada pejabat, buku petunjuk bagi peserta dan mempersiapkan daftar hadir. 2) Pelaksanaan: Dalam kegiatan Temu Wicara, yang bertindak sebagai pimpinan Temu Wicara adalah Kontak Tani yang ditunjuk oleh penyelenggara atau peserta sidang.. Pimpinan Temu Wicara tersebut

bertindak sebagai pengatur waktu, pengatur acara tanya jawab dan menyimpulkan hasil pembicaraan.

Pertemuan dan dialog dua arah antara petani atau kontak tani dengan pejabat pemerintah atau stakeholder lainnya dengan bahasan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan kehutanan serta ide, gagasan, laporan dan usulan petani kepada pemerintah. Terbukanya dialog interaktif antara pemerintah dan petani dalam temu wicara sangat besar manfaatnya bagi kedua belah pihak khususnya bagi peningkatan peran serta aktif petani dalam pembangunan. Selanjutnya pemerintah menindaklanjuti hasil temu wicara ini dengan sebaik-baiknya.

Temu wicara petani dengan presidennya banyak dilakukan pada masa pemerintahan orde baru, dan kini lebih banyak temu wicara dilakukan pada waktu kunjungan kerja pejabat pusat khususnya Menteri baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui *Tele conference* sebagai temu wicara jarak jauh. Metode penyuluhan temu wicara ke depan seyogyanya dapat lebih ditingkatkan frekuensi dan mutunya pada tiap tingkatan pejabat daerah.

8. Temu Karya

Adalah pembelajaran melalui melihat secara langsung produk yang dihasilkan, beberapa kelompok petani saling bertemu, untuk menunjukkan produk unggulannya dan kemudian diikuti dengan diskusi untuk saling menyampaikan pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai sehingga produk yang dihasilkan berkualitas sangat baik. Salah satu jenis metode berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi adalah Temu karya atau Temu Hasil, Temu karya adalah pertemuan antara petani atau kelompok tani/nelayan dengan petani/nelayan dan kelompok tani/nelayan lain untuk saling tukar menukar informasi ihwal hasil karya masing-masing petani/nelayan maupun dalam hal pengalaman dan gagasan dalam kegiatan usaha tani/nelayan.

Tujuan dilaksanakan Kegiatan Temu Karya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2015 adalah: 1) agar para pelaku utama dan pelaku usaha dapat tukar-menukar pengalaman dan keterampilan, 2) menambah wawasan serta menambah keakraban, 3) meningkatkan semangat berusaha dan motivasi untuk bekerja, 4)

meningkatkan rasa percaya diri atas kemampuan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta, 5) menggali teknologi spesifik lokalitas sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kemampuan dan prakarsa peserta dalam pengembangan teknologi.

Tema Kegiatan Temu Karya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2015 adalah **“MELALUI TEMU KARYA KITA CIPTAKAN SEMANGAT KERJA DAN KARYA GUNA MEWUJUDKAN KELOMPOK TANI DAN NELAYAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Kegiatan Temu Karya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2015 berisi kegiatan perlombaan yang terdiri dari 3 kategori lomba, yakni: 1) Unjuk Karya, 2) Asah Terampil, 3) Praktek/peragaan.

9. Temu Usaha

Pembelajaran melalui temu usaha adalah pertemuan antara petani atau kontak tani dengan para pengusaha, baik pengusaha Agroindustri di segmen hulu (pengusaha benih, pupuk, obat dan alsintan) maupun para pengusaha pengolahan produk primer dan pengusaha di segment pemasaran. Pertemuan ini dilakukan agar terjadi dialog dua arah antara petani dan pengusaha untuk membahas permasalahan yang dihadapi petani maupun pengusaha serta mencari solusi alternatif terbaik secara bersama-sama dan saling memahami dalam ke mitra-setaraan.

Penyelenggaraan temu bisnis atau temu usaha harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun sistem agribisnis dan *sylovoagribisnis* dengan mengintegrasikan secara vertikal kegiatan hulu sampai pemasaran, sehingga petani mendapatkan nilai tambah (*added value*) dan mampu mendongkrak peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarganya. Keberadaan pengusaha yang memiliki *sense of business* lebih tinggi dari pada petani dan jajaran birokrasi dalam temu usaha atau temu bisnis yang diselenggarakan harus dipandang sebagai mitra petani dan harus dijauhkan dari anggapan bahwa pengusaha sebagai lawan petani, sehingga petani dapat didampingi untuk hal-hal berikut: 1) Pemilihan komoditas yang memiliki keunggulan pasar daripada komoditas konvensional yang diusahakan petani, 2) Perencanaan usaha agribisnis yang lebih layak dan memberikan margin

yang lebih besar kepada petani, 3) Perencanaan produksi produk primer baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai permintaan pasar

Perencanaan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Upaya pendampingan petani dalam temu usaha atau temu bisnis ini seringkali tidak mudah dilakukan karena alur pikir dan persepsi yang berbeda dari kedua belah pihak yang tidak jarang menjerus kepada kecurigaan akan terjadinya saling mengeksploitasi antara pengusaha dan petani. Penyuluh dan aparatur pemerintah penyelenggara temu usaha bertindak lugas dan arif untuk menengahi dan memberikan pengertian yang benar ihwal hal ini. Kesulitan pengusaha terutama eksportir atas kesinambungan ekspor produk yang telah distandarisasi serta kesempitan dan keterbatasan petani dalam banyak hal harus secara bersama dipertimbangkan dalam membangun sistem agribisnis.

10. Temu Lapangan

Temu Lapangan adalah pertemuan antara petani -nelayan dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan temu lapangan yaitu: 1) Membuka kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi hasil penelitian, 2) Membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitian, 3)Menyalurkan teknologi di kalangan petani secara cepat, 4)Menjalin hubungan yang akrab antara peneliti, penyuluh dan petani. Temu Lapangan dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di lapangan yang khusus dipersiapkan sesuai dengan materi yang akan dibahas.

Penyelenggaraannya adalah petugas pertanian, para peneliti atau petugas lain bahkan juga petani yang ditunjuk oleh instansi pertanian. Peserta temu lapangan adalah petani yang mampu mengemukakan gagasan atau masalah dan mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang dibahas, dan petugas peneliti yang menguasai dan bertanggung-jawab dalam materi yang akan dibahas. Dalam pelaksanaan temu lapang, diperlukan pimpinan sidang atau moderator, pembicara, narasumber dan penulis. Moderator sebaiknya kontak tani yang ditunjuk

oleh peserta, kemudian pembicara ialah peneliti yang akan mengemukakan materi bahasan dan narasumber ialah peneliti lain yang mengetahui atau menguasai materi yang akan dibahas sedangkan penulis adalah salah seorang peserta atau penyelenggara. Diharapkan informasi-informasi baru diperoleh dari pembicara dapat menambah pengetahuan maupun pengalaman kelompok yang mendengarkan.

11. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan. Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan maksud agar memperlihatkan suatu inovasi baru kepada sasaran secara nyata atau konkret. Melalui kegiatan demonstrasi sasaran (*audience*) diajarkan mengenai keterampilan, memperagakan cara kerja teknik-teknik baru termasuk keunggulannya untuk menyempurnakan cara lama.

Dalam penyuluhan pertanian dikenal ada dua macam demonstrasi, yaitu: 1) demonstrasi cara, dan 2) demonstrasi hasil. Sedangkan menurut bentuknya dikenal ada 4 tingkatan demonstrasi, yaitu:

- a. **Demonstrasi Plot** (*demplot*); demonstrasi usaha tani perorangan dengan penerapan teknologi pertanian pada usaha tani kecil dengan komoditi tertentu (tanaman pangan, perkebunan, ternak, ikan, dan penghijauan). Luas lahan yang digunakan 0,1 Ha. Pembiayaannya berasal dari pemerintah atau pihak swasta yang bertujuan mempromosikan produk atau teknologinya.
- b. **Demonstrasi Farming** (*demfarm*); demonstrasi usaha tani dengan penerapan teknologi pertanian pada usaha tani yang dilakukan secara kelompok. Luas lahan yang digunakan 1-5 ha.
- c. **Demonstrasi Area** (*dem-area*); demonstrasi usaha tani gabungan kelompok dengan penerapan teknologi pertanian pada usaha tani yang dilakukan secara kerja sama antara kelompok dalam satu gabungan kelompok. Luas lahan yang digunakan 25-100 ha. *Dem-area* ini merupakan pola dasar dari model *intensifikasi khusus (INSUS)*.
- d. **Demonstrasi Unit** (*demi-unit*); demonstrasi yang dilaksanakan antar gabungan kelompok tani dalam suatu hamparan Wilayah Kerja Penyuluhan. Kegiatan utamanya meliputi, produksi, pengolahan,

penguasaan, dan pemasaran hasil pertanian, menuju kepada pembangunan masyarakat perdesaan.

12. Mimbar Sarasehan

Mimbar sarasehan merupakan forum konsultasi antara wakil para petani beserta keluarganya dengan pihak pemerintah, yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah-masalah pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani nelayan dalam rangka membangun pertanian.

Tujuan Mimbar Sarasehan adalah (1) memahami keadaan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di lapangan, baik oleh pihak petani-nelayan maupun oleh pejabat pemerintah, (2) mencapai kesepakatan bersama tentang pemecahan masalah-masalah beserta penyusunan rencana kegiatan yang mencakup usaha tani nelayan dan kehidupan petani-nelayan beserta keluarganya, (3) melaksanakan penerapan kegiatan di lapangan sesuai dengan kesepakatan bersama, (4) meningkatkan peranan dan peranserta petani-nelayan sebagai subjek pembangunan dan (5) mewujudkan hubungan timbal balik yang serasi antara kontak tani-nelayan dan pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian untuk memperbaiki perencanaan masa yang akan datang.

• *Beberapa Pengertian yang Perlu Diketahui*

- a. **KTNA** (Kontak Tani-Nelayan Andalan) adalah kontak tani nelayan yang ditetapkan oleh para petani-nelayan berdasarkan musyawarah diantara mereka dan dianggap dapat membawakan aspirasi petani-nelayan, wanita tani-nelayan dan taruna tani-nelayan di daerahnya.
- b. **Ahli andalan** adalah tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian/pengalaman di suatu bidang usaha tani nelayan
- c. **Kelompok andalan** adalah kelompok yang terdiri dari sejumlah kontak tani-nelayan andalan dan beberapa ahli andalan yang dikukuhkan pemerintah
- d. **Penasehat Mimbar Sarasehan** Orang-orang yang merupakan ketua organisasi profesi lingkup pertanian antara lain:
 - 1) **HKTI** (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)

- 2) **HNSI** (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)
- 3) Organisasi profesi lainnya sesuai dengan tingkat wilayah kerja penyuluhan mereka sebagai penasihat mimbar sarasehan misalnya: tingkat nasional, tingkat I/propinsi, tingkat II/kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

e. Kesepakatan Mimbar Sarasehan

Kesepakatan Mimbar Sarasehan ialah keputusan yang disepakati antara kelompok andalan dengan pemerintah mengenai sesuatu pemecahan masalah. Kesepakatan dirumuskan secara tertulis oleh panitera mimbar sarasehan dan disahkan oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersepakat sesuai tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

f. Panitera Mimbar Sarasehan

Panitera tetap mimbar sarasehan ialah pejabat pertanian yang melayani kegiatan mimbar sarasehan dan sebagai pembina kelompok andalan.

- 1) Di BPP - Salah seorang penyuluh BPP
- 2) Di Kab/Kota - Salah seorang kepala seksi dari dinas pertanian/Bapeluh
- 3) Tingkat Propinsi - Salah satu kepala dinas/Bakorluh yang ditetapkan Pemda Tkt-I
- 4) Tingkat Nasional - Kepala Pusat Pembinaan penyuluh pertanian

- Peserta Mimbar Sarasehan adalah:

- 1) Kelompok andalan
- 2) KTNA yang dianggap perlu memberi masukan
- 3) Panitera tetap
- 4) Pejabat Pemda
- 5) Penasehat Mimbar Sarasehan
- 6) Pejabat yang berkaitan pokok bahasan

- **Langkah-langkah Pelaksanaan**

- a. Persiapan Panitera tetap
 - Menghimpun materi Mimbar Sarasehan
 - Menyusun acara Sarasehan
 - Penyebaran undangan (Sebaiknya 2 minggu sebelum pelaksanaan)

b. Pelaksanaan Sarasehan

Pembagian Tugas:

- Pimpinan Sidang - Seorang KTNA
- Pembicara - Yang menyampaikan masalah
- Sekretaris - Dari Panitera
- Pembicara bisa lebih dari satu orang
- Ketua dan sekretaris merumuskan kesepakatan bersama peserta yang menguasai masalah.
- Acara sesuai agenda yang telah disahkan peserta mimbar sarasehan

c. Penentuan pokok bahasan dalam Mimbar Sarasehan

Pokok bahasan dalam suatu mimbar sarasehan dapat berupa:

- Pokok bahasan bisa kebijaksanaan baru pemerintah
- Umpan balik dari implementasi kebijaksanaan pemerintah
- Inovasi baru yang berpengaruh luas pada usaha tani maupun masyarakat luas
- Pokok bahasan yang sangat mendesak dibahas
- Cara-cara penentuan pokok bahasan adalah:
- Berdasarkan usulan dari pihak Kontak tani-Nelayan Andalan, menurut kepentingan mereka
- Berdasarkan usulan pihak pemerintah yang dikaitkan dengan proses percepatan program pembangunan pertanian

d. Hasil Mimbar Sarasehan

Secara umum, hasil dari suatu mimbar sarasehan adalah:

- Bertambahnya pengertian dan pemahaman terhadap masalah yang dibahas
- Rumusan kesepakatan
- Rumusan masalah yang belum dipecahkan
- Rumusan masalah yang tidak dipecahkan
- Pelaporan dan Penyebarluasan Hasil Sarasehan

Setelah acara berakhir, panitera tetap berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan dan menyebarkan hasil kesepakatan secara tertulis, kepada seluruh kontak tani nelayan dan seluruh dinas, instansi, lembaga, organisasi profesi peserta mimbar sarasehan. Masalah yang tidak terpecahkan perlu disampaikan secara terpisah kepada instansi, dinas dan lembaga pemerintah satu tingkat di atasnya yang

berhubungan dengan masalah tersebut. Bila masalah telah dapat dipecahkan, maka panitera tetap perlu menyampaikannya pada acara mimbar sarasehan berikutnya.

13. Widyaiswara

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Widyaiswara adalah jabatan karier yang menuntut kompetensi tinggi di masing-masing jenjangnya.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan kerja, karakteristik, sikap dan perilaku yang mutlak dimiliki Widyaiswara untuk mampu melakukan tugas tanggung-jawabnya secara profesional. Seorang widyaiswara pertanian bertugas menjadi instruktur dalam pelatihan kegiatan pertanian, misalnya pelatihan bagi penyuluh pertanian, oleh karena itu mereka harus menguasai semua butir kompetensi Widyaiswara yang tercantum di bawah ini yang diturunkan dari uraian tugas jabatan fungsional Widyaiswara yaitu:

- a. Melakukan analisis kebutuhan diklat pertanian
- b. Menyusun kurikulum diklat pertanian
- c. Menyusun bahan ajar diklat pertanian
- d. Menyusun GBPP/SAP/Transparansi untuk diklat pertanian
- e. Menyusun modul diklat pertanian
- f. Menyusun tes hasil belajar
- g. Melakukan tatap muka di depan kelas diklat pertanian
- h. Memberikan tutorial dalam Diklat Jarak Jauh
- i. Mengelola program diklat sebagai penanggung jawab dalam program Diklat
- j. Mengelola program diklat sebagai anggota dalam program Diklat
- k. Membimbing peserta diklat dalam penulisan kertas kerja
- l. Membimbing peserta diklat dalam praktik kerja lapangan
- m. Menjadi fasilitator/moderator/nara sumber dalam seminar/loka karya/diskusi atau yang sejenis
- n. Memberikan konsultasi penyelenggaraan diklat
- o. Melakukan evaluasi program diklat

- p. Mengawasi pelaksanaan ujian
- q. Memeriksa jawaban ujian
- r. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Widyaiswara.

Widyaiswara adalah sebagai seorang nara sumber fungsional pertanian oleh karena itu, diharapkan dapat terus belajar pengetahuan maupun teknologi baru bidang pertanian, yang dibutuhkan oleh penyuluh pertanian maupun kelompok tani.

14. Pameran

Pameran merupakan metode penyuluhan pertanian dengan pendekatan massal. Sifat pengunjungnya heterogen, tidak terbatas hanya pada petani tetapi juga orang yang bukan petani. Dalam pameran akan dijumpai berbagai macam *visual aid* yang digunakan secara tunggal atau digabungkan. Tujuan pameran pertanian, yaitu: a) memperlihatkan fakta, dan memberi informasi kepada pengunjung, b) memperlihatkan suatu cara, misalnya cara mengetahui benih yang baik, cara memproses bibit dengan kultur jaringan, c) memajukan usaha, artinya mengajak para pengunjung untuk ikut melaksanakan atau mencontoh apa yang dilihatnya, dan d) memperkenalkan hasil-hasil usaha, memperlihatkan hasil yang dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang baik.

15. Kampanye

Kampanye artinya seruan terus menerus yang dilakukan secara sengaja untuk melakukan suatu tindakan. Pada kegiatan penyuluhan maka, ajakan yang dilakukan berkaitan dengan usaha tani, kampanye yang dilakukan terus menerus diharapkan dapat diikuti oleh petani dan keluarganya, sehingga dapat merubah pengetahuan, sikap maupun ketrampilan keluarga tani. Sebagai contoh kampanye penggunaan pupuk organik, kampanye penanaman TOGA di sekitar pekarangan, kampanye penggunaan benih bersertifikat.

C. Teknik Penyuluhan

Teknik penyuluhan pertanian dapat didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber atau penyuluh dalam memilih serta menata simbol dan isi pesan menentukan pilihan cara dan

frekuensi penyampaian pesan serta menentukan bentuk penyajian pesan. Mardikanto (2006) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam Metode dan teknik penyuluhan pertanian, meliputi:

1. Upaya Pengembangan Untuk Berpikir Kreatif

Prinsip ini dimaksudkan bahwa melalui penyuluhan pertanian harus mampu menghasilkan petani-petani yang mandiri, mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang diketahui untuk memperbaiki mutu hidupnya.

2. Tempat yang Paling Baik Adalah di Tempat Kegiatan Sasaran

Prinsip ini akan mendorong petani belajar pada situasi nyata sesuai permasalahan yang dihadapi.

3. Setiap Individu Terkait dengan Lingkungan Sosialnya

Prinsip ini mengingatkan kepada penyuluh bahwa keputusan-keputusan yang diambil petani dilakukan berdasarkan lingkungan sosialnya.

4. Ciptakan Hubungan yang Akrab Dengan Sasaran

Keakraban hubungan antara penyuluh dan sasaran memungkinkan terciptanya keterbukaan sasaran dalam mengemukakan masalahnya.

5. Memberikan Sesuatu Untuk Terjadinya Perubahan

Prinsipnya adalah setelah mendapatkan penyuluhan, maka materi penyuluhan yang disampaikan dapat menggerakkan kelompok tani untuk melakukan perubahan dalam mengelola usaha taninya.

Beberapa penggolongan teknik penyuluhan pertanian, antara lain:

1. Penggolongan berdasarkan teknik komunikasi.
2. Penggolongan berdasarkan jumlah sasaran.
3. Penggolongan berdasarkan indera penerima.

Penggunaan teknik penyuluhan, tidak lepas dari metode penyuluhan yang digunakan, oleh karena itu seorang penyuluh pertanian, harus mampu menggabungkan antara metode dan teknik penyuluhan yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan.

1. Penggolongan Berdasarkan Teknik komunikasi

Berdasarkan teknik komunikasi, Metode dan teknik penyuluhan pertanian digolongkan menjadi: 1) komunikasi langsung (*direct communication/face to face communication*), contohnya: obrolan di sawah, obrolan di balai desa, obrolan di rumah, telepon/HP, kursus tani, demonstrasi karya wisata, dan pameran; dan 2) komunikasi tidak langsung (*indirect communication*), contohnya publikasi dalam bentuk cetakan, poster, siaran radio/TV, dan pertunjukan film. Jadi, dalam kegiatan komunikasi tidak langsung, pesan disampaikan melalui perantara (medium atau media).

2. Penggolongan Berdasarkan Jumlah Sasaran

Berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai, Metode dan teknik penyuluhan pertanian digolongkan menjadi: 1) pendekatan perorangan, contohnya: kunjungan rumah, kunjungan usaha tani, surat-menyurat, dan hubungan telepon; 2) pendekatan kelompok, contohnya: diskusi kelompok, demonstrasi (cara atau hasil), karya wisata, temu lapang, temu usaha, dan kursus tani; 3) pendekatan massal, contohnya: pameran, pemutaran film, siaran pedesaan/TV, pemasangan poster, pemasangan spanduk, dan penyebaran bahan bacaan (*folder, leaflet, liptan, brosur*).

3. Penggolongan Berdasarkan Indera Penerima

Berdasarkan indera penerima, Metode dan teknik penyuluhan pertanian dapat di golongan menjadi 1) yang diterima oleh indera penglihatan, contohnya: poster, film, dan pemutaran slide; 2) yang diterima oleh indera pendengaran, contohnya: siaran TV/radio, pidato, ceramah, dan hubungan telepon; 3) yang diterima oleh beberapa indera, contohnya: demonstrasi (cara atau hasil), siaran TV/radio (interaktif), dan pameran.

Tujuan memilih Metode dan teknik penyuluhan pertanian antara adalah:

1. Agar penyuluh pertanian dapat menetapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dan berhasil guna.
2. Agar kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan untuk menimbulkan perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan perilaku petani dan anggota keluarganya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pada umumnya, seseorang belajar melalui indera. Indera ini merupakan pintu gerbang masuknya "*stimulus*" ke dalam diri seseorang yang belajar. Setiap indera akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar seseorang. Seperti salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh *Socony Vacuum Oil Co.* Dalam Padmowihardjo (2000:6) yaitu: melalui indera pengecap 1 persen, melalui indera peraba 1,5 persen, melalui indera penciuman 3,5 persen, melalui indera pendengaran 11 persen dan melalui indera penglihat 83 persen. Sedangkan Hasmosoewignyo dan Garnadi (1962) dalam Kartasapoetra (1991:60) menyatakan bahwa, hasil penangkapan dari mendengar saja 10 persen, melihat saja 50 persen, melihat, mendengar dan mengerjakan sendiri (praktik) 90 persen. Jadi, dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan agar kegiatan tersebut berhasil, sebaiknya menggunakan lebih dari satu indera penerima.

D. Materi Penyuluhan

1. Pengertian Materi

Berarti segala sesuatu yang tampak. Dalam pengertian yang lebih luas materi sering diartikan sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, atau disampaikan. Di bidang penyuluhan pertanian materi penyuluhan diartikan sebagai pesan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada sasaran penyuluhan. Pesan penyuluhan dapat berupa pesan kognitif, afektif, psiko motorik maupun pesan kreatif. Pesan penyuluhan ada yang bersifat anjuran (*persuasif*), larangan (*instruktif*), pemberitahuan (*informatif*) dan hiburan (*entertainment*). Dalam bahasa teknis penyuluhan, materi penyuluhan seringkali disebut sebagai informasi pertanian (suatu data/bahan yang diperlukan penyuluh, petani-nelayan, dan masyarakat tani). Materi penyuluhan antara lain dapat berbentuk pengalaman misalnya pengalaman petani yang sukses mengembangkan komoditas tertentu, hasil pengujian/hasil penelitian, keterangan pasar atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku

usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Materi penyuluhan sangat menentukan terhadap jenis metode penyuluhan pertanian yang akan digunakan. Misalnya, penyuluhan tentang intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian sangat berbeda dengan penyuluhan intensifikasi ayam buras, intensifikasi ternak potong, intensifikasi kedele atau intensifikasi padi (inovasi teknis). Berlainan pula dengan materi pembentukan poktan dan gapoktan (menyangkut inovasi sosial) serta penyuluhan tentang perkreditan dan kontrak kerja (inovasi ekonomi).

Informasi dan teknologi pertanian tersebut sering kita sebut sebagai pesan penyuluhan atau materi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya di dalam memilih materi penyuluhan haruslah benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran dalam hal ini pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Oleh karena itu maka materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang di bidang penyuluhan pertanian.

2. Tujuan

Materi penyuluhan pertanian dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pertanian. Karena itu materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang di bidang penyuluhan pertanian. Verifikasi materi penyuluhan pertanian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian materi penyuluhan pertanian yang belum diverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

3. Ruang Lingkup

Dalam proses komunikasi antara penyuluh dengan sasaran, penyuluh pertanian akan menyampaikan segala sesuatu yang menyangkut ilmu (teori) dan teknologi (praktis) pertanian, kesemuanya itu disebut materi penyuluhan. Dapat dikatakan bahwa materi penyuluhan pertanian adalah segala isi (*content*) yang terkandung dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi, ilmu sebagai materi penyuluhan yang disampaikan kepada petani dapat berupa pengetahuan, misalnya pemberian informasi tentang perkembangan pertanian, atau informasi tentang varietas dari suatu komoditi yang sifatnya hanya untuk diketahui, sedangkan yang bersifat praktis, misalnya materi tentang budidaya tanaman seperti, cara memilih benih, cara mengolah tanah, cara memupuk, atau dalam bidang peternakan, seperti cara melakukan vaksinasi, pembuatan pakan dan teknologi yang berhubungan dengan kegiatan petani. Dengan demikian, informasi teori sifatnya memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar, sedangkan informasi teknologi menyangkut cara-cara yang sifatnya membimbing dan mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan.

Untuk dapat menjalankan tugas di wilayah kerjanya maka penyuluh perlu memahami beberapa lingkup sasaran pengenalan antara lain:

- a. Lingkup pengenalan geografi pertanian meliputi:
 - 1) Lokasi wilayah: geografis, administrasi kerja
 - 2) Topografi wilayah misal tinggi tempat
 - 3) Keadaan tanah: klasifikasi jenis tanah, luas dan penggunaan tanah, status kepemilikan, kecocokan dengan tanaman dan lain sebagainya.
 - 4) Keadaan iklim: catatan harian hujan, curah hujan, suhu, kelembaban, intensitas penyinaran maupun angin.
 - 5) Keadaan pengairan mulai dari saluran primer sampai kwarter
 - 6) Luas dan macam vegetasi beserta pengelolaannya
 - 7) Daerah rawan bencana alam: banjir, kekeringan, hama dll.
- b. Lingkup pengenalan teknik berusaha tani meliputi:
 - 1) Pelaksanaan aspek panca usaha tani seperti:

- Panca usaha tanaman pangan
- Panca usaha tanaman perkebunan
- Panca usaha ternak potong
- Panca usaha perikanan
- 2) Pola dan tata tanam per kesatuan waktu dalam satu lahan tertentu (*multiple cropping*, jarak, komposisi, jenis tanaman/*monoculture*)
- 3) Pola pengusahaan usaha tani (satu usaha atau berbagai usaha/*polyvalent*)
- c. Lingkup pengenalan ekonomi pertanian
 - 1) Analisa usaha tani terhadap: setiap komoditi, setiap pola tanam, setiap pola pengusahaan.
 - 2) Penyaluran dan pengadaan saprodi
 - 3) Lembaga-lembaga perekonomian: koperasi, pengolahan, pemasaran, perkreditan, dll.
 - 4) Sistem dan tingkat upah tenaga kerja manusia/hewan.
 - 5) Sistem bagi hasil yang telah dilakukan.
 - 6) Lapangan dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.
 - 7) Kontribusi pendapatan dari usaha tani terhadap pendapatan keluarga.
- d. Lingkup pengenalan sosiologi pedesaan meliputi:
 - 1) Aspek kependudukan meliputi: jumlah penduduk, komposisi menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, fertilitas, mortalitas, migrasi dan urbanisasi)
 - 2) Riwayat singkat terbentuknya desa atau kelompok tani
 - 3) Adat istiadat, hubungan kekerabatan
 - 4) Tradisi, agama dan kepercayaan
 - 5) Keadaan pendidikan penduduk (sarana prasarana yang ada)
 - 6) Keadaan kesehatan penduduk beserta sarana pra sarananya
 - 7) Kelembagaan sosial: arisan, RT, RW, Posyandu, Lembaga sosial dll.
 - 8) Ke gotong-royongan masyarakat.

Secara rinci bahan atau materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian meliputi:

- a. Segala informasi pertanian yang mencakup:
 - 1) Pengalaman praktek para petani yang “lebih” berhasil baik dari wilayah yang bersangkutan maupun dari luar wilayahnya yang mempunyai kondisi agroklimat yang (hampir) serupa;

- 2) hasil-hasil pengujian, terutama dari pengujian lokal (*local verification trials*);
 - 3) Saran rekomendasi yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - 4) Keterangan pasar seperti: catatan harga hasil-hasil pertanian, penawaran dan atau permintaan akan sarana produksi dan hasil-hasil pertanian, dan lain-lain;
 - 5) Berbagai kebijaksanaan dan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat yang berkaitan dengan sektor pertanian seperti kebijaksanaan harga-dasar, peraturan tentang permohonan dan pengembalian kredit, dan lain-lain.
- b. Latihan keterampilan tentang:
- 1) teknis pertanian seperti penggunaan alat-alat/mesin pertanian, teknik/cara memupuk, menggunakan sprayer, dan lain-lain;
 - 2) mengelola usaha tani berupa mengerjakan soal-soal latihan analisa usaha tani, pengumpulan informasi pasar dan lain-lain.
- c. Dorongan dan atau rangsangan menuju swakarsa, swa karya, dan swadaya masyarakat berupa:
- 1) perlunya berusaha tani secara berkelompok, pembentukan organisasi dan atau lembaga-lembaga pelayanan seperti koperasi, kios produksi, perkreditan, transportasi, dan lain-lain;
 - 2) menciptakan berbagai kemudahan fasilitas yang diperlukan seperti penyediaan alat-alat/mesin pertanian, perlengkapan rumah-tangga untuk yang punya hajat, dan lain-lain.

Ditinjau dari *subject-matter* (materi pokok) yang harus diberikan sebagai bahan penyuluhan pertanian, pada dasarnya materi penyuluhan pertanian dapat dikelompokkan dalam:

- a. **Ilmu Teknik Pertanian** yang tidak hanya mencakup mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa, bagaimana, kapan dan di mana harus dilaksanakan. Materi yang diberikan harus dikaitkan dengan pengalaman yang dimiliki petani setempat dan harus disertai kepercayaan kepada realitas-realitas yang ditemui di lapangan. Materi termasuk dalam ilmu tentang teknik pertanian adalah:

- 1) Kegiatan pra panen yang meliputi: (a) pola bertanam dan teknik pertanamannya. (b) pemupukan yang efektif. (c) pemanfaatan air secara efisien. (d) perlindungan tanaman secara terpadu dengan menerapkan teori ambang ekonomi. (e) penggunaan varietas unggul;
- 2) kegiatan pascapanen meliputi: (a) panen perontokan (b) pengangkutan (c) pengeringan (d) pengolahan dan (e) penyimpanan.

b. Ilmu Ekonomi Pertanian yang terutama diarahkan kepada usaha pengelolaan usaha tani yang lebih bermanfaat secara ekonomis maupun non ekonomis. Termasuk dalam materi ilmu ekonomi pertanian adalah:

- 1) pengelolaan usaha tani yang lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip optimisasi yakni: (a) hasil fisik yang maksimum (b) keuntungan optimum (c) penekanan biaya (masukan);
- 2) penguasaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian;
- 3) penggunaan atau pemanfaatan kemudahan kredit produksi pertanian;
- 4) kelembagaan ekonomi pertanian: koperasi dan lain-lain.

Dalam penyampaian ilmu ekonomi pertanian harus selalu menerapkan pendekatan multi disiplin dengan analisis interdisiplin yang tidak hanya bagi usaha menaikkan pendapatan dan atau keuntungan usaha tani dalam waktu terbatas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip perluasan lapangan dan kesempatan kerja serta usaha pelestarian lingkungan hidup.

a. Sumber-sumber Materi Penyuluhan Pertanian

Mardikanto (1993) menyebutkan bahwa sumber materi penyuluhan pertanian dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Sumber resmi dari instansi pemerintah, seperti:
 - Kementerian/dinas-dinas terkait
 - Lembaga penelitian dan pengembangan
 - Pusat-pusat pengkajian
 - Pusat-pusat informasi
 - Pengujian lokal yang dilaksanakan oleh penyuluh

- 2) Sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian, pengkajian dan penyebaran informasi
- 3) Pengalaman petani, baik pengalaman usaha taninya sendiri atau hasil dari petak pengalaman yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhnya.
- 4) Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya: informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi dan lain-lain.

Dalam kegiatan penyuluhan maka perlu pertimbangan dalam memilih materi, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih materi penyuluhan antara lain:

1. Pertimbangan Materi Penyuluhan Berdasarkan Tingkat Keragaman Kebutuhan Sasaran

Dengan keragaman kebutuhan sasaran maka dalam memilih materi penyuluhan, hendaknya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan cara memilah-milah materi yang seyogyanya mampu memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi oleh sasaran utama dan dapat mengakomodir keragaman kebutuhan sasaran. Sebagaimana acuan yang diberikan Arboleda (1981) dalam Mardikanto (1993) agar setiap penyuluh mampu membedakan ragam materi penyuluhan yang ingin disampaikan pada setiap kegiatannya ke dalam:

a. Materi Pokok (*Vital*)

Materi pokok merupakan materi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diketahui oleh sasaran utamanya. Materi pokok sedikitnya mencakup 50 persen dari seluruh materi yang disampaikan

b. Materi Penting (*Important*)

Materi penting berisi dasar pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sasarannya. Materi ini diberikan sekitar 30 persen dari seluruh materi yang disampaikan.

c. Materi Penunjang (*Helpful*)

Materi penunjang masih berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan yang sebaiknya diketahui oleh sasaran untuk memperluas cakrawala pemahamannya tentang kebutuhan yang dirasakannya itu. Materi ini maksimal 20 persen dari seluruh materi yang disampaikan, materi

yang kurang menarik menyebabkan petani merasa bosan mendengarkan yang berdampak pada ke tidak-hadiran pada kegiatan penyuluhan.

2. Pertimbangan Materi Penyuluhan Berdasarkan Kemampuan Penerapan Materi Oleh Sasaran

Agar materi yang dipilih benar-benar bermanfaat dan dapat diterapkan oleh sasaran, maka hendaknya sebuah materi perlu dipertimbangkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah jika materi ini diterapkan dapat memberikan keuntungan yang nyata kepada sasaran?
- b. Apakah jika materi ini disampaikan dapat mengisi kegiatan-kegiatan komplementer daripada kegiatan yang ada sekarang?
- c. Apakah materi ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat ?
- d. Apakah materi ini sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, tidak memerlukan ketrampilan yang terlalu tinggi dari sasaran?
- e. Apakah sasaran memiliki cukup pengetahuan, biaya dan sarana yang diperlukan, dalam menerapkan materi ini?
- f. Seberapa lama dapat dimanfaatkan dan apakah segera dapat memberikan hasil yang nyata?
- g. Apakah materi ini bila diterapkan oleh sasaran tidak memerlukan ongkos tambahan yang terlalu mahal?
- h. Apakah materi ini memiliki resiko yang besar dalam penerapannya?
- i. Apakah manfaat dari penerapannya menarik dan menonjol ?
- j. Dapatkah penerapan materi ini dilakukan dalam berbagai keadaan dan mudah diperluas dalam kondisi yang berbeda-beda ?

Dari beberapa pertanyaan tersebut, penyuluh dapat menilai apakah suatu materi tepat atau tidak untuk disampaikan pada sasaran.

3. Pertimbangan Materi Penyuluhan Berdasarkan *Locally Specific*

Kebutuhan materi penyuluhan antara wilayah satu dengan wilayah lain tentunya tidak sama. Berdasarkan hal ini tentu perlu juga memiliki pertimbangan mengangkat materi tentang inovasi teknologi spesifik lokalitas dengan memperhatikan potensi yang terdapat di daerah setempat. Sebagai contoh, di wilayah Papua akan lebih efektif jika dilakukan penyuluhan mengenai pengembangan produktivitas sagu

dan ubi mengingat komoditas tersebut adalah bahan pangan utama di daerah itu. Contoh lain misalnya di daerah Garut, pemberdayaan pupuk buatan dari kotoran kambing bisa dijadikan materi unggulan dalam program penyuluhan karena di daerah tersebut hampir sebagian besar penduduknya memelihara kambing.

E. Proses Penyuluhan

Proses belajar dalam penyuluhan dinilai efektif jika ada proses dialog/berbagi pengalaman antar sesama warga belajar, dengan kata lain proses belajar berlangsung secara partisipatif. Dan suasana belajar harus bersifat informal sehingga mendorong warga belajar untuk saling menghargai kerjasama. Untuk meningkatkan efektivitas belajar, ada beragam jenis cara belajar yang dapat dipraktikkan oleh penyuluh maupun petani, sebagai berikut:

1. **Belajar konsep**, yaitu mengabstraksikan ide atau realitas dalam pikiran kemudian disusun dalam bentuk konsep, selanjutnya berikan respon yang tepat terhadap realita yang ada menurut konsep yang diketahui tersebut. Contoh: Seorang petani menghadapi tanaman yang layu, maka dia akan berusaha mencari air.
2. **Belajar prinsip**, yaitu mempelajari hubungan konsep-konsep yang memiliki arti tertentu menurut aturan tertentu pula. Dengan kata lain, belajar prinsip adalah mempelajari beragam prinsip yang memiliki arti tertentu. Contoh: Jika seorang petani menghadapi tanaman layu dan menurut konsep disebabkan oleh serangan penyakit maka petani harus mempelajari prinsip-prinsip perlindungan tanaman yang benar.
3. **Kemampuan merespon** yang benar terhadap beragam stimulus yang berbeda (*multiple discrimination*). Dalam hal ini, individu yang bersangkutan harus mampu memahami dan membedakan beragam stimulus yang berbeda. Contoh: Jika seorang petani menghadapi tanaman yang layu dia harus mampu mengidentifikasi sebab-sebab kelayuannya dan memberikan respon yang tepat untuk mengatasi kelayuan tersebut.
4. **Belajar memecahkan masalah** (*problem solving learning*) yaitu mempelajari cara-cara memecahkan masalah yang dihadapi. Jika

ternyata masalahnya tidak dapat dipecahkan melalui penerapan prinsip tertentu, dia harus mencari prinsip lainnya. Contoh: jika petani menghadapi serangan hama tikus dia dapat memberantas dengan cara gropyokan, tetapi jika cara ini belum efektif dia harus mencoba cara lainnya (misal pemasangan umpan, pengasapan lubang tikus, dan sebagainya).

5. **Belajar partisipatif**, yaitu belajar proses bersama yang dilakukan sekelompok individu dengan atau tanpa difasilitasi orang luar, dimana sesama peserta didik saling berinteraksi, saling membantu, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta saling memperhatikan (*helping, sharing, dan caring*). Keuntungan proses belajar ini adalah semua peserta ajar memperoleh pengakuan dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat dan pengalaman masing-masing. Contoh: curah pendapat, tanya jawab, diskusi, bermain peran, studi kasus, tugas kelompok dan sebagainya.
6. **Belajar penelusuran dan penemuan**, yaitu kegiatan belajar yang dirancang untuk menemukan akar masalah, dalam rangka memecahkan masalah melalui serangkaian aktivitas penyelidikan. Contoh: Penerapan metode penyuluhan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).

F. Evaluasi Hasil Penyuluhan

Evaluasi hasil penyuluhan dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari tujuan penyuluhan, oleh karena itu posisinya sangat penting dalam suatu kegiatan penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut sehingga suatu kegiatan penyuluhan dapat berkelanjutan. Evaluasi penyuluhan meliputi evaluasi perubahan yang terjadi pada kelompok tani, ditinjau dari perubahan pengetahuan, sikap, ketrampilan maupun kesejahteraan kelompok tani.

1. Jenis-jenis evaluasi penyuluhan antara lain:

a. Evaluasi Proses Penyuluhan

Merupakan alat untuk mengambil keputusan dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan, dari hasil evaluasi penyuluhan

pertanian dapat diketahui, jenis perubahan yang terjadi pada kelompok tani, hambatan yang terjadi, efektifitas penyuluhan, dampak dari penyuluhan sehingga tumbuh pemahaman dalam penyempurnaan program penyuluhan. Proses yang dievaluasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring evaluasi yang dilakukan. Proses perencanaan meliputi jenis materi yang akan disampaikan, peserta yang dibutuhkan, penyuluh yang diberi tugas, modul yang digunakan, lokasi yang akan digunakan, sumber biaya dan lain sebagainya. Evaluasi pengorganisasian meliputi panitia yang bertugas serta kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan evaluasi pelaksanaan dilakukan saat pelaksanaan penyuluhan.

b. Evaluasi Program Penyuluhan

Evaluasi program penyuluhan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok tani sehingga dari hasil evaluasi dapat ditentukan apakah program dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan. Efektifitas program dievaluasi dengan melibatkan kelompok tani sebagai penerima manfaat, oleh karena itu suatu program yang direncanakan diutamakan yang merupakan masukan dari penerima manfaat program. Kegiatan *Partisipasi Rural Appraisal* (PRA) sangat dibutuhkan untuk menyusun program penyuluhan, selain program-program penyuluhan yang berasal dari pemerintah, oleh karena itu evaluasi program biasanya dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam rangka implementasi rencana strategis yang telah disusun.

c. Evaluasi hasil Penyuluhan

Penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pembelajaran yang bertujuan untuk merubah perilaku kelompok tani, perubahan yang diharapkan meliputi kognitif, afektif dan psiko motorik. Perubahan kognitif mencakup kemampuan mengembangkan inteligensia mencakup pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis dan sintesis. Perubahan afektif mencakup kemampuan sikap, minat, nilai, menanggapi, menilai/tata nilai, dan menghayati. Perubahan psiko motorik mencakup kemampuan gerak motor kekuatan, kecepatan, kecermatan, ketepatan, ketahanan dan keharmonisan

Pengukuran perubahan pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian pre test dan post test, pengukuran perubahan sikap dilakukan melalui pengisian kuesioner dalam bentuk pernyataan berkaitan dengan kemampuan sikapnya menggunakan skala Likert sehingga dapat dianalisis, perubahan psiko motorik dapat dilakukan dengan ujian praktek atau melihat secara langsung implementasi hasil penyuluhan. Oleh karena itu sebagai penunjang dilakukan evaluasi dampak penyuluhan untuk mengetahui tingkat implementasi program penyuluhan yang telah diterima kelompok tani.

d. Evaluasi metode penyuluhan

Evaluasi metode penyuluhan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan metode yang digunakan, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui kuesioner ditanyakan kepada peserta, berdasarkan absensi kehadiran peserta, berdasarkan keaktifan peserta, berdasarkan nilai pre test maupun pos test. Ketepatan metode yang digunakan berdampak kepada jenis perubahan yang terjadi pada peserta penyuluhan, hal ini ditunjang pula dengan teknik penyuluhan yang digunakan.

e. Evaluasi sarana prasarana

Evaluasi sarana pra sarana penyuluhan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat jumlah dan jenis sarana pra sarana dapat mendukung kenyamanan peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Jenis sarana pra sarana yang dievaluasi meliputi sarana pra sarana pembelajaran, sarana pra sarana akomodasi dan transportasi, sarana pra sarana konsumsi dan lain sebagainya. Dapat dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada peserta untuk mengisi tingkat kepuasan dari sarana pra sarana yang digunakan selama penyuluhan, hasil evaluasi digunakan untuk pengajuan guna perbaikan sarana pra sarana penyuluhan di kegiatan penyuluhan berikutnya.

f. Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan

Evaluasi pelaksanaan penyuluhan adalah evaluasi yang menyeluruh dari suatu kegiatan penyuluhan, oleh karena itu beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur evaluasi pelaksanaan penyuluhan adalah:

- 1) efektifitas dan efisiensi penyuluhan
- 2) ketercapaian tujuan penyuluhan
- 3) Sumbangan perubahan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan
- 4) Rencana tindak lanjut yang diusulkan

Suatu penyuluhan yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada peserta penyuluhan oleh karena itu perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi dampak penyuluhan.

g. Evaluasi Dampak Penyuluhan

Dampak penyuluhan dievaluasi minimal 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan, evaluasi dapat dimulai dari sejauh mana peserta penyuluhan mengimplementasikan hasil penyuluhan, evaluasi peningkatan pendapatan yang diperoleh, dan dampak peningkatan kesejahteraan yang terjadi. Pada pendidikan non formal maka evaluasi dampak sangat dianjurkan, sedangkan pada pendidikan formal evaluasi hasil yang dianjurkan oleh karena itu pada kegiatan penyuluhan maka evaluasi dampak dilakukan melalui pembinaan lanjutan pasca penyuluhan untuk membantu petani mengimplementasikan hasil penyuluhan. Evaluasi dilakukan secara langsung ke lokasi atau berkunjung dari rumah ke rumah petani, sehingga lebih rinci dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi para petani

1) Tahapan evaluasi penyuluhan

Dalam kegiatan evaluasi penyuluhan maka tahapan yang dilakukan adalah:

a) Memahami tujuan penyuluhan

- siapa sasaran penyuluhan
- perubahan perilaku apa yang dikehendaki
- materi penyuluhan apa yang akan disampaikan
- bagaimana kondisi/situasi yang ditetapkan

b) Menetapkan indikator evaluasi yang akan dilaksanakan

- Indikator perubahan kognitif meliputi penguasaan pengetahuan (*knowledge*), penguasaan pengertian (*comprehension*), kemampuan menerapkan (*application*),

kemampuan analisis (*analysis*), kemampuan sintesis (*synthesis*).

- indikator perubahan kemampuan afektif meliputi menyadari (mau memilih), tanggap atau mau, yakin atau mau mengikuti, menghayati atau selalu menerapkan.
- indikator perubahan psiko motorik meliputi kecepatan, kekuatan, ketahanan, kecermatan, ketepatan, ketelitian, kerapian, keseimbangan, keharmonisan.

c) Menyusun alat ukur dan analisa data hasil evaluasi

- indikator kinerja yang akan dievaluasi
- alat ukur yang akan digunakan
- analisis data yang akan digunakan

BAB IV

IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF PADA KELOMPOK WANITA TANI

A. Konsep Penyuluhan Pertanian Partisipatif

Penyuluhan partisipatif artinya mengikutsertakan anggota tani dalam kegiatan penyuluhan, ke ikut-sertaan tersebut mencakup:

1. Keterlibatan emosional dan mental
2. Kontribusi dan aktivitas dalam mencapai tujuan
3. Menyusun bahan penyuluhan, menyediakan sarana dan prasarana, mengikuti dan melaksanakan kegiatan penyuluhan.
4. Mengevaluasi hasil penyuluhan serta menyusun rencana tindak lanjutnya

Untuk memahami konsep penyuluhan partisipatif ini maka perlu memahami lebih dahulu beberapa definisi partisipasi yaitu:

1. Sikap kerja sama petani dalam pelaksanaan program penyuluhan dengan cara menghadiri penyuluhan, demo, mengemukakan pendapat, mengemukakan pertanyaan pada agen penyuluh.
2. Pengorganisasian kegiatan penyuluhan oleh kelompok tani seperti pertemuan, demo, surat kabar petani dll.
3. Menyediakan informasi untuk merencanakan program penyuluhan yang efektif
4. Ikut serta dalam pengambilan keputusan

5. Anggota tani membayar seluruh atau sebagian biaya penyuluhan
6. Supervisi agen penyuluhan oleh anggota dewan organisasi petani yang memperkerjakannya.

Alasan petani harus berpartisipasi antara lain:

1. Mereka memiliki informasi yang penting untuk merencanakan program yang berhasil
2. Mereka lebih termotivasi jika ikut bertanggung jawab didalamnya
3. Mereka berhak terlibat dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan penyuluhan
4. Permasalahan di lapangan yang sangat banyak tidak mungkin diputuskan oleh perseorangan tetapi keputusan kelompok berdasar pendapat anggota.

Tingkatan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Tingkat saling mengerti, tujuannya membantu para anggota kelompok agar memahami fungsi dan tugasnya
2. Tingkat penasehatan, anggota cenderung siap memberi usul, saran dalam pemecahan masalah
3. Tingkat otoritas, memberi kewenangan pada kelompok dalam memutuskan dan menerima apapun hasil keputusan kelompok

Prinsip pelaksanaan penyuluhan partisipatif secara garis besar adalah:

1. Mengatur iklim penyuluhan
2. Melibatkan anggota tani dalam perencanaan penyuluhan
3. Melibatkan anggota tani dalam mendiagnosa kebutuhan penyuluhan
4. Melibatkan anggota tani dalam menyusun bahan penyuluhan
5. Melibatkan anggota tani dalam merancang rencana penyuluhan
6. Membantu anggota tani dalam mengevaluasi hasil penyuluhan

Bagaimanakah peran penyuluh dalam kegiatan penyuluhan pertanian partisipatif, hal ini sangatlah penting diperhatikan karena dalam kegiatan ini penyuluh mempunyai peran dalam mengelola penyuluhan, oleh karena itu beberapa peran penyuluh dalam penyuluhan pertanian partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Mengajari petani, cara mencapai tujuan secara lebih efektif dengan mendirikan dan mengelola organisasi petani yang efektif.
2. Menggunakan organisasi petani tersebut sebagai perantara berkomunikasi petani melalui:
 - a. berpartisipasi dalam pertemuan organisasi
 - b. mengajar di kelompok tani
 - c. menulis artikel di koran tani yang dikelola kelompok tani
 - d. melibatkan wakil kelompok dalam merencanakan program lanjutan
 - e. mendorong tukar pikiran dan informasi dalam kelompok
3. bekerja sebagai karyawan pada dinas penyuluhan

Sebagai pedoman dalam implementasi penyuluhan pertanian partisipatif maka tahapan partisipasi yang dilakukan adalah:

- a. Berpartisipasi dalam melakukan identifikasi kebutuhan (mencakup partisipasi dalam analisis *SWOT*, pengisian kuesioner *need assessment*, metode *Q-short*, penyampaian masalah yang di hadapi, maupun masalah umum petani)
- b. Berpartisipasi dalam menentukan materi penyuluhan (mencakup tindak lanjut analisis kebutuhan, kemudian diidentifikasi kebutuhannya)
- c. Berpartisipasi dalam mempersiapkan media belajar serta sarana pra sarana penyuluhan (mencakup tempat penyuluhan, bahan penyuluhan, peralatan penyuluhan)
- d. Berpartisipasi pada proses penyuluhan (mencakup aktif sebagai peserta, aktif dalam *FGD*, aktif dalam melakukan praktek)
- e. Berpartisipasi dalam evaluasi kebutuhan (mencakup menentukan standar evaluasi, aspek yang dievaluasi, prosedur evaluasi serta pelaksanaan evaluasi)

B. Analisis Kebutuhan Penyuluhan

Analisis kebutuhan penyuluhan dilakukan untuk menentukan materi penyuluhan yang akan dilakukan, kegiatan melibatkan kelompok tani sebagai penerima manfaat penyuluhan, sebagai yang mempunyai masalah yang dapat diselesaikan melalui kegiatan penyuluhan. Salah satu metode analisis kebutuhan yang dapat digunakan adalah metode

partisipatif yaitu PRA (*Partisipasi Rural Appraisal*) adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996). Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah: saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000). Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri. Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin.

Tujuan penerapan metode PRA adalah pengembangan program bersama masyarakat, penerapannya perlu senantiasa mengacu pada siklus pengembangan program. Gambaran umum siklus tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi, dengan maksud untuk menggali informasi tentang keberadaan lingkungan dan masyarakat secara umum.
2. Perumusan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atas dasar masalah dan potensi setempat.
3. Identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembuk masyarakat.
4. Pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya.

5. Perencanaan penerapan gagasan dengan pemecahan masalah tersebut secara konkrit agar implementasinya dapat secara mudah dipantau.
6. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaannya di tingkat yang lebih besar.
7. Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.
8. Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.
9. Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan, masalah yang telah terpecahkan, munculnya masalah lanjutan, dll.
10. Dalam perkembangannya telah banyak dikembangkan beberapa teknik PRA yang pada intinya merupakan bentuk implementasi dari metode PRA. Sudah barang tentu teknik-teknik yang dikembangkan tersebut disesuaikan dengan maksud dan tujuan penerapan metode PRA sendiri, serta semestinya tidak menutup kemungkinan atau bahkan dapat disebutkan mengharuskan adanya improvisasi dan modifikasi terhadap metode PRA itu sendiri.
11. Beberapa teknik penerapan PRA antara lain: (a) Penelusuran Alur Sejarah, (b) Penelusuran Kebutuhan Pembangunan, (c) Analisa Mata Pencarian, (d) Penyusunan Rencana Kegiatan, (e) *Focus Group Discussion*, (f) Pemetaan, dll. Secara lengkap, teknik PRA.

Prinsip yang ditekankan dalam PRA ialah:

1. Saling Belajar dari Kesalahan dan Berbagi Pengalaman dengan Masyarakat

Prinsip dasar PRA bahwa PRA adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PRA dibangun dari pengakuan serta kepercayaan masyarakat yang meliputi pengetahuan tradisional dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri. Prinsip ini merupakan pembalikan dari metode pembelajaran konvensional yang bersifat mengajari masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa dalam perkembangannya pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan yang terjadi, sementara itu pengetahuan modern yang diperkenalkan

orang luar tidak juga selalu memecahkan masalah. Oleh karenanya diperlukan ajang dialog di antara keduanya untuk melahirkan sesuatu program yang lebih baik. PRA bukanlah suatu perangkat teknik tunggal yang telah selesai, sempurna, dan pasti benar. Oleh karenanya metode ini selalu harus dikembangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Kesalahan yang dianggap tidak wajar, bisa saja menjadi wajar dalam proses pengembangan PRA. Bukannya kesempurnaan penerapan yang ingin dicapai, namun penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada dan mempelajari kekurangan yang terjadi agar berikutnya menjadi lebih baik. Namun PRA bukan kegiatan coba-coba (*trial and error*) yang tanpa perhitungan kritis untuk meminimalkan kesalahan.

2. Keterlibatan Semua Anggota Kelompok, Menghargai Perbedaan, dan Informal

Masyarakat bukan kumpulan orang yang homogen, namun terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Oleh karenanya keterlibatan semua golongan masyarakat adalah sangat penting. Golongan yang paling diperhatikan justru yang paling sedikit memiliki akses dalam kehidupan sosial komunitasnya (miskin, perempuan, anak-anak, dll). Masyarakat heterogen memiliki pandangan pribadi dan golongan yang berbeda. Oleh karenanya semangat untuk saling menghargai perbedaan tersebut adalah penting artinya. Yang terpenting adalah pengorganisasian masalah dan penyusunan prioritas masalah yang akan diputuskan sendiri oleh masyarakat sebagai pemiliknya. Kegiatan PRA dilaksanakan dalam suasana yang luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi santai tersebut akan mendorong tumbuhnya hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota bukan sebagai tamu asing yang harus disambut secara protokoler. Dengan demikian suasana kekeluargaan akan dapat mendorong kegiatan PRA berjalan dengan baik.

3. Orang Luar Sebagai Fasilitator dan Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama, peran orang luar hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, instruktur, dll. Perlu bersikap rendah hati untuk belajar dari masyarakat dan menempatkannya sebagai nara sumber utama. Bahkan dalam

penerapannya, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Secara ideal sebaiknya penentuan dan penggunaan teknik dan materi hendaknya dikaji bersama, dan seharusnya banyak ditentukan oleh masyarakat.

4. Konsep Triangulasi

Untuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (*check and recheck*). Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim (disiplin ilmu), sumber informasi (latar belakang golongan masyarakat, tempat), dan variasi teknik.

- a. Penggunaan variasi dan kombinasi berbagai teknik PRA, yaitu bersama masyarakat bisa diputuskan variasi dan kombinasi teknik PRA yang paling tepat sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan program.
- b. Menggali berbagai jenis dan sumber informasi, dengan mengusahakan kebenaran data dan informasi (terutama data sekunder) harus dikaji ulang dan sumbernya dengan menggunakan teknik lain.
- c. Tim PRA yang multidisipliner, dengan maksud sudut pandang yang berbeda dari anggota tim akan memberi gambaran yang lebih menyeluruh terhadap penggalian informasi dan memberi pengamatan mendalam dari berbagai sisi.

5. Optimalisasi Hasil

Pelaksanaan PRA memerlukan waktu, tenaga nara sumber, pelaksana yang terampil, partisipasi masyarakat yang semuanya terkait dengan dana. Untuk itu optimalisasi hasil dengan pilihan yang menguntungkan mutlak harus dipertimbangkan. Oleh karenanya kuantitas dan akurasi informasi sangat diperlukan agar jangan sampai kegiatan yang berskala besar namun biaya yang tersedia tidak cukup.

6. Berorientasi Praktis

Orientasi PRA adalah pemecahan masalah dan pengembangan program. Dengan demikian dibutuhkan penggalian informasi yang tepat dan benar agar perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang pasti tetapi salah, atau lebih baik mencapai perkiraan yang hampir salah daripada kesimpulan yang hampir benar.

7. Keberlanjutan Program

Masalah dan kepentingan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karenanya, pengenalan masyarakat bukan usaha yang sekali kemudian selesai, namun merupakan usaha yang berlanjut. Bagaimanapun juga program yang mereka kembangkan dapat dipenuhi dari prinsip dasar PRA yang digerakkan dari potensi masyarakat.

8. Mengutamakan yang Terabaikan

Prinsip ini dimaksudkan agar masyarakat yang terabaikan dapat memperoleh kesempatan untuk berperan dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. Keberpihakan pada pihak atau golongan masyarakat yang terabaikan bukan berarti bahwa golongan masyarakat lainnya (elite masyarakat) perlu mendapat giliran untuk diabaikan atau tidak diikutsertakan. Keberpihakan ini lebih pada upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan dan lapisan yang ada di masyarakat, dengan mengutamakan golongan paling miskin agar kehidupannya dapat meningkat.

9. Pemberdayaan (Penguatan) Masyarakat

Kemampuan masyarakat ditingkatkan melalui proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, penilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian masyarakat memiliki akses (peluang dan kesempatan) serta memiliki kemampuan memberikan keputusan dan memilih berbagai keadaan yang terjadi. Dengan demikian mereka dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan 'orang luar'.

10. Santai dan Informal

Penyelenggaraan kegiatan PRA bersifat luwes, tidak memaksa, dan informal sehingga antara orang luar dan masyarakat setempat terjalin hubungan yang akrab, orang luar akan berproses masuk sebagai

anggota masyarakat. Dengan demikian kedatangan orang luar tidak perlu disambut atau dijamu secara adat oleh masyarakat dan tokohnya maupun oleh pemerintah setempat. Orang luar yang masuk harus memperhatikan jadwal atau waktu kegiatan masyarakat, sehingga penerapan PRA tidak mengganggu kegiatan rutin masyarakat.

11. Keterbukaan

PRA sebagai metode dan perangkat teknik pendekatan kepada masyarakat masih belum sempurna, dan belum selesai. Berbagai teknik penerapannya di dalam praktik masih terus dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu berbagai pengalaman penerapan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperbaiki konsep dan pemikiran serta dalam merancang teknik-teknik baru sehingga sangat berguna dalam memperkaya metode ini.

C. Penentuan Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan diambil dari hasil analisis kebutuhan, beberapa teknik penentuan tujuan penyuluhan digunakan untuk menentukan tujuan yang penting yang merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Salah satu metode yang paling tepat dalam menentukan tujuan penyuluhan adalah metode *Q short*, yaitu metode pengambilan keputusan yang sepenuhnya diserahkan kepada kelompok tani, sehingga tujuan penyuluhan tersebut sesuai kebutuhan petani.

Tahapan dalam metode *Q short* adalah:

1. Pemberian kertas ukuran 10x10 Cm, kepada semua anggota tani yang hadir.
2. Penulisan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan usaha taninya dilakukan oleh semua petani yang hadir.
3. Identifikasi semua permasalahan yang disampaikan oleh kelompok tani.
4. Penggolongan permasalahan yang disampaikan para petani meliputi permasalahan kesuburan tanah, cara budidaya, cara penanganan pasca panen, pengemasan, transportasi, pemasaran maupun penggudangan.

5. Pemilihan masalah yang paling utama melalui metode kelereng, yaitu dari hasil penggolongan masalah dapat diketahui jumlah masalah yang dihadapi petani yang paling utama, setiap masalah diwakili oleh satu kelereng. Setiap petani mendapatkan kelereng sejumlah masalah yang telah diidentifikasi dan digolongkan.
6. *Voting* permasalahan dengan cara menyiapkan gelas, sebanyak permasalahan yang telah di pilih. Kemudian setiap kelereng yang sudah diberikan kepada petani dapat mewakili permasalahan yang dipilih. Para peserta *voting* dipersilahkan memasukkan kelereng ke dalam gelas yang mewakili masing-masing masalah, sesuai kebutuhan petani.
7. Perhitungan hasil *voting* dilakukan dengan menghitung jumlah kelereng tiap-tiap gelas, dan gelas terbanyak adalah masalah yang dipilih sebagai tujuan penyuluhan

Kegiatan penentuan tujuan penyuluhan melibatkan kelompok tani bertujuan agar terjadi kesesuaian antara permasalahan yang dihadapi kelompok tani dengan tujuan penyuluhan yang akan dilaksanakan. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat memotivasi tingkat kehadiran petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

D. Penentuan Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan disusun berdasarkan masalah yang ditemukan dan diselesaikan melalui penyuluhan, pada kegiatan penyuluhan partisipatif maka sebagian materi penyuluhan disediakan oleh petani dan sebagian berasal dari insentif pemerintah. Penyuluh akan menjelaskan materi yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan kemudian diidentifikasi materi yang disediakan petani dan materi yang disediakan oleh penyuluh. Tahapan identifikasi materi penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi teori-teori** yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah, misal permasalahannya adalah harga pupuk yang mahal, penyelesaian masalah membuat pupuk organik dari sisa-sisa tanaman pertanian atau kotoran ternak. Maka dibutuhkan informasi berkaitan dengan teori-teori pembuatan pupuk organik, serta teori

yang telah dikuasai petani, kemudian susun langkah kerjanya ber sama-sama dengan petani.

2. **Identifikasi peralatan** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, untuk pembuatan kompos organik maka peralatan yang dibutuhkan adalah karung plastik, timbangan, ember plastik, gayung, pisau pencacah, thermometer dan Hygrometer.
3. **Identifikasi bahan** yang digunakan termasuk media/agensi mikroba yang digunakan. Pada pembuatan kompos bahan yang digunakan antara lain sisa tanaman, kotoran ternak, EM 4, gula pasir, jika bahan tersebut sulit diperoleh maka digunakan alternatif penggantinya. Misal jika tidak ditemukan EM 4 maka dapat digunakan mikroba lokal yang dibuat dari juice buah pepaya yang ditambah gula kemudian difermentasi selama seminggu.

Setelah dilakukan identifikasi materi penyuluhan tahapan selanjutnya adalah membagi dan mengelompokkan materi menjadi dua yaitu materi alat dan materi bahan, sehingga memudahkan dalam bekerja sama.

E. Pembagian Tugas dalam Kegiatan Penyuluhan

Pada kegiatan penyuluhan pertanian partisipatif maka semua yang terlibat membantu menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Dari hasil identifikasi masalah yang dicontohkan adalah pembuatan pupuk organik maka sangat jelas pembagian tugasnya yaitu siapa petani yang membawa sisa tanaman, siapa yang membawa kotoran ternak, siapa yang membawa mikroba lokal atau EM4, siapa yang membawa gula pasir, siapa yang membawa karung plastik, siapa yang membawa ember plastik, siapa yang membawa timbangan, sedangkan thermometer dan Hygrometer disediakan oleh penyuluh. Dengan pembagian tugas ini maka petani merasa dihargai dan merasa memiliki kegiatan yang akan dilakukan, hal ini dapat memotivasi tingkat kehadiran saat kegiatan penyuluhan.

Partisipatif artinya ikut terlibat dengan demikian setiap anggota kelompok tani ikut terlibat dalam menyediakan materi alat maupun materi bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan, dengan proses partisipatif maka semua materi penyuluhan disediakan sendiri

oleh kelompok tani, dan mereka bertanggung jawab menyediakan karena kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan merupakan permasalahan yang mereka ajukan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan penyuluhan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Salah satu kebijakan pertanian sampai tahun 2025, adalah membangun basis partisipasi petani, petani diharapkan terlibat penuh dalam kegiatan penyuluhan mulai dari analisis kebutuhan sampai penyusunan rencana tindak lanjut untuk kegiatan penyuluhan berikutnya, sehingga terus menerus terjadi pembinaan pada petani sesuai kebutuhannya, yang didukung sepenuhnya oleh petani dan merupakan usulan kegiatan yang menjadi permasalahan para petani sehingga mereka sanggup menyediakan peralatan maupun bahan untuk kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan. Membangun basis partisipasi petani, haruslah merupakan kesadaran petani itu sendiri, dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk pengembangan usaha tani menjadi lebih maju yaitu pertanian industrial yang berkelanjutan.

F. Persiapan Jadwal Penyuluhan

Pada penyuluhan pertanian partisipatif maka jadwal disusun oleh petani dan penyuluh, sehingga waktu penyuluhan keduanya dapat hadir. Biasanya dari pihak petani menginginkan penyuluhan dilakukan setelah pekerjaan di sawah selesai yaitu sekitar pukul 10.00 sampai pukul 14.00. Dengan demikian penyuluh dapat mengatur jadwalnya dengan terlebih dahulu ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian, kemudian ke lokasi penyuluhan, dan kembali ke kantor.

Untuk membantu mempermudah menyusun jadwal maka dapat dibuat tabel kegiatan penyuluhan sebagai berikut

Tabel 4.1
Jadwal Kegiatan Penyuluhan

No	minggu Kegiatan	1	2	3	4	5	6	Penanggung jawab
1	Evaluasi kebutuhan	X						
2	Persiapan materi		X					
3	Pelaksanaan kegiatan			X				
4	Evaluasi hasil				X			
5	Implementasi hasil					X		
6	Penyusunan RTL						X	

Setiap petani dilibatkan sebagai penanggung jawab kegiatan sehingga komunikasi dengan petani lain maupun dengan penyuluh menjadi lebih intensif, jika terjadi kegagalan pada hasil penyuluhan dapat segera diketahui dan dicari solusinya bersama antara petani dan penyuluh. Kegagalan penyuluhan harus dihindari karena orang dewasa belajar dari pengalaman, orang dewasa mempunyai pengalaman, kegagalan mengakibatkan menurunnya motivasi kehadiran maupun implementasi hasil penyuluhan, yang berdampak terhentinya proses penyuluhan.

Bagi penyuluh sebaiknya mencoba terlebih dahulu di kantor penyuluhan atau di rumah sebelum menyampaikan kegiatan penyuluhan sehingga resiko keberhasilan lebih tinggi.

G. Pelaksanaan Penyuluhan

Tahap pelaksanaan penyuluhan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan atau berurutan sesuai materi yang disepakati, sebagai contoh pembuatan kompos organik maka yang dilakukan pada saat pelaksanaan penyuluhan adalah semua petani terlibat sehingga tahapan yang dilakukan adalah:

1. Persiapan bahan, dapat dilakukan oleh beberapa petani yaitu:
 - timbang bahan kompos, untuk bahan nabati langsung dicacah
 - penimbangan starter/mikroba, kemudian diuji tingkat kehidupannya.
 - Penimbangan gula pasir
 - Pengukuran air

2. Persiapan alat, dilakukan oleh seorang petani dengan memastikan semua alat bekerja dengan baik, dalam contoh ini yang diperiksa termometer dan hygrometer tidak rusak, plastik tidak bocor, timbangan berfungsi dengan baik.
3. Pelaksanaan penyuluhan

Pada kegiatan ini usahakan semua petani berkumpul dan terlibat menyaksikan pelaksanaan penyuluhan. Sebagai contoh pembuatan kompos organik maka diharapkan semua petani terlibat dalam setiap tahapan, yang dimulai dari pencampuran bahan baku dengan mikroba, pemasukan dalam karung plastik, peletakan alat pengukur suhu dan kelembaban, kemudian penutupan rapat.

H. Evaluasi Hasil Penyuluhan

Evaluasi hasil penyuluhan dilakukan untuk mengetahui tingkat keterserapan pengetahuan maupun ketrampilan yang dipelajari. Berbagai cara dilakukan untuk mengukur mulai dari *pre-test* dan *post test* sampai ujian praktek. Pada penyuluhan partisipatif kegiatan evaluasi dilakukan dengan melibatkan petani peserta penyuluhan. Pada contoh disini maka evaluasi hasil dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Evaluasi selama proses fermentasi dilakukan selama 2 minggu (14 hari), maka semua petani mempunyai tugas mengukur suhu dan kelembaban produk fermentasi yaitu suasana udara yang ada dalam karung plastik dengan melihat angka yang tercantum dalam termometer maupun higrometer, yang hasilnya didiskusikan secara langsung dengan penyuluh, karena menyangkut apakah fermentasi dilanjutkan atau dihentikan.
2. Evaluasi hasil yaitu terhadap kompos yang dihasilkan dapat diukur dari fisik maupun kimia. Secara fisik dapat dijelaskan syarat kompos yang baik dan dibandingkan dengan kompos yang dihasilkan, kemudian didiskusikan dengan semua petani, kekurangan atau kelebihan hasil kegiatan.
3. Evaluasi penggunaan hasil penyuluhan, dilakukan dengan mengimplementasikan produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha taninya, dalam contoh ini adalah menggunakan kompos hasil

penyuluhan untuk memupuk tanaman, kemudian diamati dibandingkan dengan tanaman yang tidak dipupuk.

4. Evaluasi dampak penyuluhan dilakukan dengan mengamati perubahan sikap dan ketrampilan petani pasca penyuluhan. Apakah petani telah berminat dan mengerjakan pembuatan kompos atau tidak, tergantung sejauh mana petani mau menerima inovasi.

Dari hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan, apakah program penyuluhan dilanjutkan, dikembangkan, diperbaiki atau dihentikan, oleh karena itu saat evaluasi dilibatkan semua anggota agar keputusan yang diambil mewakili dari semua kelompok tani.

I. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Pada penyuluhan-penyuluhan tertentu, setelah sesi kegiatan dalam pelatihan tersebut selesai, maka kepada peserta diminta agar mereka menuliskan rencana tindak lanjut (RTL). Artinya, setelah peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari penyuluhan itu, para peserta membuat rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Dari hasil pelaksanaan penyuluhan tersebut, selanjutnya RTL yang dapat dirumuskan misalnya adalah sebagai berikut:

- Petani merencanakan pada musim tanam yang akan datang mengusulkan kepada PPL setempat untuk mencoba membuat petak percontohan dan menggunakan pupuk organik hasil praktek, untuk mengetahui efektifitas maupun efisiensi pupuk yang dihasilkan.
- Selain dengan usulan kegiatan tersebut di atas, petani berkeinginan untuk mencoba mengaplikasikan beberapa bahan baku untuk pembuatan pupuk organik, yang dilaksanakan prakteknya mengikuti jadwal yang direncanakan.
- PPL wilayah binaan yang membawahi kelompok tani sasaran akan melakukan intensifikasi pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan uji coba berbagai pupuk pada berbagai komoditi tanaman.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut merupakan bagian dari kegiatan penyuluhan secara keseluruhan sehingga tahap pembinaan

dapat berkelanjutan dan terus menerus sampai petani dapat mandiri mengelola usaha taninya. Penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pendidikan non formal, yang salah satu prinsipnya adalah pendidikan sepanjang hayat, dengan pembinaan terus menerus maka petani memperoleh dan mengikuti kegiatan pendidikan sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ban, Van Den, A.W. dan Hawkins, A.S. 2001. *Penyuluhan Pertanian*, Kanisius, Yogyakarta.
- Croos P., 1981. *Adults As Learners*, Jossey-Bass Publishers, California.
- Chukwu, G. C., & Miriam, C. (2014). Asian Journal of Social Sciences Women Farmers ' Participation in Agricultural Extension Activities in Ikwuano L. G. A, Abia State Nigeria, 1(1), 1-7.
- Dave R.H., 1982. *Foundations of Lifelong Education*, Unesco Institute For Education Hamburg and Pergamon Press, Germany.
- Djohani, Rianingsih. 1996a. *Berbuat Bersama Berperan Setara*. Driya Media. Bandung.
- Edythe J.H., David W.J., Roger T.J., 1994. *Cooperative Learning in the Classroom*, ASCD, United States of America.
- Evans, D.R. 1981. *The Planning of Non Formal Education*, Paris: Unesco: International Institute for Educational Planning
- Gito S, 2000. *Buku Ajar PRA*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung (Tidak Publikasi)
- Gito S, 2000. *Buku Ajar PRA*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung (Tidak Publikasi)
- Gwivaha, F. A. (2015). Factors that impact agricultural extension training programs for smallholder women farmers in Njombe District, Tanzania. *Iowa State University, Digital Repository*.
- Hantoro Tapari, 2015. *Penyuluh Pertanian* pada Setbakorluh Prov Jateng, Yogyakarta.
- Havelock, 1995. *The Change Agent's Guide*, Educational Technology Publications Englewood Cliffs, New Jersey.
- Heryawan A., 2015. *Pembangunan Ketahanan Pangan Jawa Barat*, Seminar Lemhanas, Pemprov Jabar, Bandung.
- Hubeis Aida Vitalaya S., 2010. *Pemberdayaan Perempuan (dari masa ke Masa)*, IPB Press, Bogor.

- Kartasapoetra, A.G., 1988. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara, Jakarta
- Kementan, 2013. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian*, Kementerian Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, Jakarta.
- Khudori, Nizwar S., Pantjar S., Sudi M., 2005. *Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Levis L.R., 2013. *Perilaku Petani*, Ledalero, Maumere.
- Liee A., 2002. *Cooperative Learning*, Grasindo, Jakarta.
- Mardikanto, T., 1999. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mikkelsen, B. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*
- Moeliono, Ilya dan Djohani Rianingsih. 1996. *Kebijakan dan strategi menerapkan PRA dalam Pengembangan Program*. Driya Media. Bandung.
- Nataliningsih. (2016). Cooperative Learning in Extension of Participatory Agriculture. *Assehr*, 88 (Bandung, Indonesia), 128-130. Retrieved from nataliningsih@yahoo.co.id
- Nurdin Dasmal, 1985. *Komunikasi dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Padmowihardjo, S., 2000. *Metode Penyuluhan Pertanian*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Pasluddin A., 2015. *Komitmen Legislatif Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia*, Seminar Lemhanas, Pemprov Jabar, Bandung.
- Pranarka dan Prijono O.S., 1996. *Pemberdayaan (konsep, Kebijakan dan Implementasi)*, CSIS, Jakarta.
- Richard A.S., Malcolm S.K., and Elwood F.H., 1998. *The Adult Learner*, London: Elsevier Butterworth Heinemann
- Rochdyanto, Syaiful. 2000. *Langkah-langkah Pelaksanaan Metode PRA*. Makalah ToT PKPI. Yogyakarta
- Samsudin, U. 1987. *Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*, Bina Cipta, Bandung.

- Soedijanto, 2004. *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Agribisnis*, Departemen Pertanian, Jakarta
- Soltani, S., Ahmadpour, A., & Feali, S. (2011). Factors Influencing Rural Women Participation in Agricultural Extension Programs, Case Study Mazandaran, Iran. *International Journal of Agricultural Science and Research*, 2(4).
- Suseno, G. P., & Nataliningsih. (2017). Experiential learning implementation based on joint responsibility in women's cooperative development (Case study on Farmer Women Cooperative, Sumedang, West Java). *AIP Conference Proceedings*, 1887(September), 020025. <http://doi.org/10.1063/1.5003508>
- Sukino, 2013. *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sutarni S. dan Mardikanto Totok, 1982. *Pengantar Penyuluhan Pertanian*, Hapsara, Surakarta
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 *tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*, Jakarta
- Universitas Terbuka, 2011. *Strategi pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian*, diakses pada tanggal 20/03/2013.
<http://www.ut.ac.id/html/suplemen/luht4230/strategi.htm>
- Usman S., 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Ir. Hj. Nataliningsih, M.Pd.



Dilahirkan di Madiun pada tanggal 25 Desember 1961, anak pertama dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Ibu Koesbaniyah dan Bapak Moehasim B.A.. Pada tahun 1988 menikah dengan Dr. H Gijanto Purbo Suseno SE. M.Sc. Dan dikarunia tiga orang anak bernama Anggi Denisa Huseina (1989), Angga Ahya Huseina (1991) dan Agit Fathan Huseina (1995) dan menantu Kukuh Pandu Wicaksana (1988).

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh: SD. Bernardus, Madiun lulus tahun 1973, kemudian melanjutkan ke SMP ABRI Madiun lulus tahun 1980, melanjutkan ke Universitas Jenderal Soedirman jurusan Pertanian lulus tahun 1986, dan melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana (S-2) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Program studi Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan program S-3 Universitas Pendidikan Indonesia Program studi Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 2009.

Riwayat pekerjaan: setelah lulus program S-1 Unsoed, diterima sebagai dosen tetap PNS di UNSOED pada tahun 1987, pada tahun 1993 mutasi ke KOPERTIS wilayah IV Jabar dan Banten di perbantukan ke Universitas Bandung Raya dan pada tahun 2017 mutasi ke Universitas Winaya Mukti Program Studi Agribisnis, bidang ilmu Penyuluhan Pertanian.

Pengalaman penulisan buku lebih berkaitan dengan buku petunjuk praktikum yaitu praktikum Uji Organoleptik, Fisiologi Pasca Panen, Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Hasil Hortikultura. Buku Modul mata kuliah yaitu mata kuliah Penyuluhan Pertanian, Sosiologi Pedesaan, Gizi dan Pangan, Perencanaan Bisnis, Teori Pengambilan Keputusan, Uji Organoleptik dan Teknologi Hasil Pertanian yang digunakan untuk kalangan sendiri.

Pengalaman menulis journal nasional maupun internasional dari tahun 2014 yaitu *Experiential Learning Implementation Based on Joint Responsibility in Women's Cooperative Development (Case Study on Farmer Women Cooperative, Sumedang, West Java)* di muat di *GCEE Conference 2017* penerbit *AIP Conference Proceeding volume 1887 tahun 2017, Cooperative Learning in Extension of Participatory Agriculture, Vol. 88.* September 2016 *Advance in Social Education and Humanities Research* ISBN 978-1-5108-3598-6, Dampak Penyuluhan Gizi Terhadap Perubahan Sikap Kelompok Tani Wanita Vol. 4, No 4, Agustus 2016 Pemberdayaan Masyarakat ISSN no 2338-9257, Dampak Penyuluhan Pengolahan Jamur Terhadap Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Vokasional ISSN 24769002, Sifat Organoleptik Abon nabati dengan Bahan Baku Jamur Tiram, Jantung Pisang dan Sukun Vol. 1, no 1 Oktober 2015 Vokasional ISSN 24769002, Manajemen Penyuluhan Pertanian Partisipatif bagi Kelompok Tani Pemula Vol. 1 No.2 Juli 2014 Composite ISSN 9548-2089.

Pengalaman penyuluhan/pelatihan, yaitu sejak tahun 2009, menjadi instruktur nasional tetap LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dalam rangka sosialisasi KEPRES RI 80 tahun 2003, PERPRES RI Nomor 54 tahun 2010, PERPRES RI Nomor 35 Tahun 2011, PERPRES RE Nomor 70 Tahun 2012, PERPRES RI Nomor 4 Tahun 2015, serta Peraturan Kepala LKPP No 2 dan 3 tahun 2010, Peraturan Kepala LKPP No 4 dan 5 tahun 2012 sampai sekarang. Penyuluhan tentang Gizi Pangan Balita kepada para perwakilan ibu PKK Kabupaten Bandung 2017, Penyuluhan pertanian budi daya dan Pengolahan Jamur di Desa Langensari, Lembang Bandung 2016, Penyuluhan Pertanian Budidaya Beternak Bebek dan Pengolahannya di kecamatan Rancaekek 2015, Penyuluhan tentang pengolahan ikan di Citomi Subang 2014.